



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

BULETIN VIRAJATI

Media Komunikasi Online Seskoal

Edisi VIII MEI 2021

SINERGI MENJAGA KEDAULATAN NKRI DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA



ISSN 2086-9312



9772086931295

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi ke-8 Mei 2021, kembali hadir di hadapan para pembaca dalam suasana bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah, dan selamat Menunaikan Ibadah Puasa, bagi yang menjalankannya.

Buletin Virajati kali ini mengangkat tema “Sinergi Menjaga Kedaulatan NKRI di wilayah Laut Natuna Utara”. Tema ini diangkat dari hasil Seminar Studi Kawasan Strategis Dikreg LX Seskoad, di Seskoad Bandung (16/3/2021). Dipahami bahwa Nine dash line terkait Laut Natuna Utara, bukan merupakan sengketa kedaulatan (*sovereignty*), melainkan sengketa wilayah hak berdaulat (*sovereign rights*). Maka kemungkinan ancaman yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara ialah berkaitan dengan sengketa eksploitasi dan pengelolaan sumber daya. Guna menyikapi kondisi tersebut diperlukan kebijakan penanganan secara serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menyinergikan seluruh kekuatan bangsa, baik kekuatan militer dan nirmiliter melalui pemberdayaan potensi maritim yang tersedia di Kepulauan Natuna dengan penyusunan kebijakan, strategi, dan upaya yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Sehingga diharapkan dapat mendukung pengamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI, khususnya menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di wilayah perairan Natuna.

Selain mengulas tema utama, buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan yang menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi pembaca, yakni Sinergi Aparatur Penegak Hukum dalam Mewujudkan NKRI sebagai Negara Hukum, Urgensi Perencanaan, Pemahaman tentang *Australia's Defence Strategic Update* (DSU) 2020, Meningkatkan Nasionalisme Masyarakat di Wilayah Perbatasan, Manajemen Logistik Mendukung Interoperabilitas Ancab TNI AD, Pengelolaan Konflik Bahasa di Belgia, serta beberapa tulisan khas lainnya.

Semoga berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bahan/bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Redaksi

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si,

Penasihat

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc.
Kolonel Inf Dwi Endrosasongko, S.Sos.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson
Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.
Kolonel Czi Dian Hendriana Surachman

Sekretaris Redaksi

Mayor Inf Agus Sulistiyo

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.
Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.
Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Asmadi

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami
Penata Muda/III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl. Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<http://www.seskoad.mil.id>

Facebook

<https://www.facebook.com/Buletinvirajati>

Instagram

<https://www.instagram.com/Buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam “Buletin Virajati” adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam “Buletin Virajati” merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi



Daftar isi

4

SINERGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI
DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA
- **TIM REDAKSI BULETIN VIRAJATI** -

15

SINERGI APARATUR PENEGAK HUKUM GUNA
MEWUJUDKAN NKRI SEBAGAI NEGARA HUKUM
- **BRIGJEN TNI DRS. AGUNG ZAMANI, M.SC.** -

19

URGensi PERENCANAAN DALAM ORGANISASI
SESKOAD (SEBUAH CATATAN RENUNGAN)
- **BRIGJEN TNI FULAD, S.SOS, M.SI.**
(WADAN SESKOAD) -

22

PEMAHAMAN TENTANG AUSTRALIA'S
DEFENCE STRATEGIC UPDATE 2020
- **LETKOL INF RIVAN R. RIVAI** -

27

PERAN TNI AD DALAM MENINGKATKAN
NASIONALISME MASYARAKAT
DI WILAYAH PERBATASAN
- **KOLONEL INF TOGU PARMONANGAN** -

IMPLEMENTASI MANAJEMEN LOGISTIK GUNA
MENDUKUNG INTEROPERABILITAS ANTAR
KECABANGAN TNI AD
- **MAYOR CBA I KETUT**
ARSANA PUTRA, S.T., M.SC -

34

PARADIGMA BARU KOMUNIKASI SOSIAL
TNI AD YANG HUMANIS DAN ADAPTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT
- **MAYOR INF EDI TRI HERI MULYANTO** -

39

UPAYA PENGELOLAAN POTENSI
DISINTEGRASI BANGSA
PADA KONFLIK BAHASA DI BELGIA
- **MAYOR CAJ ANDI HAMZAH**
MAPPIARE, S.SOS. -

45

MENGURAI BENANG KUSUT
KONFLIK DI SURIAH DAN PENYELESAIANNYA
MELALUI UPAYA DIPLOMASI DAN NEGOSIASI
- **LETKOL INF NANANG TRI MARTONO, S.PD.** -

50

KONSEPSI MEMBENTUK SDM YANG
BERKUALITAS MELALUI PENDIDIKAN KHUSUS
DOSEN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SESKOAD
- **KOLONEL ARM ROBBY MT. S.PD. MP.D.** -

55



TIM REDAKSI BULETIN VIRAJATI
SINERGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI
DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA

ABSTRAK

Natuna yang memiliki luas sekitar 141.901 km² ini disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah, yaitu berupa potensi perikanan tangkap 504.212,85 Ton/Tahun, sedangkan potensi perikanan budidaya 34.600 Ton/Tahun. Dengan kekayaan alam inilah menjadi potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Guna menyikapi kondisi tersebut diperlukan kebijakan penanganan secara serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menyinergikan seluruh kekuatan bangsa, baik kekuatan militer dan nir militer melalui pemberdayaan potensi maritim yang tersedia di Kepulauan Natuna dengan penyusunan kebijakan, strategi dan upaya yang bersifat menyeluruh dan terpadu diharapkan dapat mendukung pengamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI, khususnya dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di wilayah perairan Natuna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sinergisitas serta Teori *Balance Of Power*, serta guna mendapatkan formulasi strategi dalam aktualisasi sinergi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya nasional guna menjaga kedaulatan NKRI dapat digunakan metode analisis *Strenght Weakness Opportunities Threat* (SWOT) dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi baik faktor internal maupun eksternal.

Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggali secara lebih dalam tentang Aktualisasi

sinergi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya nasional guna menjaga Kedaulatan NKRI di wilayah Laut Natuna Utara, dengan menggunakan Studi kepustakaan yang merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi geografis kepulauan Natuna yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil tentunya menghambat proses aktualisasi pengelolaan sumber daya. Maka dari itu, guna mempermudah pengelolaan sumber daya dan memaksimalkan pertahanan di Natuna, maka diperlukan Reklamasi Kepulauan Natuna dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang ada. Lalu, untuk memaksimalkan potensi yang ada agar tidak terbentur berbagai regulasi yang ada, maka diperlukan pemekaran wilayah Natuna sebagai Provinsi Natuna. Pasalnya pembentukan Provinsi Khusus Natuna bertujuan agar pembangunan dan perekonomian di daerah Natuna dapat lebih cepat dan merata.

DINAMIKA DI LAUT CINA SELATAN TERKAIT
PENGELOLAAN SDA SERTA PERAN TNI DAN
KOMPONEN LAINNYA



STAF KHUSUS MENKO MARNES BIDANG HANKAM MARITIM
 Laksamana Madya TNI (Purn) Fred Salem Lonan

Laut Cina Selatan saat ini merupakan hal yang sangat banyak dibahas dan diperbincangkan oleh banyak orang di belahan dunia ini. Bukan karena kekayaan alam dan posisi strategis yang dimiliki, namun lebih kepada perebutan pengaruh dan kekuasaan, dan saat ini hal itu menimbulkan beberapa kerisauan, karena walaupun PCA (Permanent Court Arbitrage) yaitu arbitrage internasional pada 12 Juli 2016 telah menetapkan pendapat akhirnya bahwa ZEE (sesuai klaim Filipina) tetap dibawah kendali Filipina, tapi China tetap abaikan, China terus mereklamasikan beberapa terumbu karang terutama banyak reef utara di kepulauan / hamparan Spratly menjadi pangkalan militer yang berada disamping SLoC yang dilewati komoditi bernilai US \$ 5,1T/tahun. Bagi Amerika, reklamasi banyak reef terutama di utara menjadi pangkalan militer adalah pelanggaran berat yang dilakukan China



1. Sarana Pemukul (beroperasi di laut territorial ke ZEE Fregat Oceangoing multi purpose, Kasel, Fighter dan Bomber TNI-AU, Rudal Ground to Surface
2. Sarana Pangkalan : Pangkalan TNI di Selat Lampa / Sabangmawang (Natuna Selatan)
3. Sarana Kodak : PIT – Datalink crypto – CMS (Combat Management System)
4. Komponen Cadangan : Injasmar, Kapal niaga, SDA dll

Saat ini, *Nine Dotted Line* “tak berkoordinat”, merupakan “kawasan imajinasi”, sehingga dalam kasus ini RI *not recognize*. Lalu, Ketidak pastian dilaut China Selatan akan berlangsung lama. Dan sesuai perkembangan bahwa Kini semua pangkalan militer hasil reklamasi telah berfungsi sesuai *military scheme*. Eksistensi China di Laut China selatan didukung oleh PDB nya yg besar. Dengan adanya kondisi tersebut, seharusnya hal ini menjadi **lampu merah** bagi RI. Jika terumbu karang *Vanguard* direklamasikan China menjadi pangkalan militer karena berjarak 185nm ke Natuna (35 menit by jet bomber). Namun begitu, adanya Investasi China di RI harus tetap berlangsung karena saling menguntungkan semua pihak. Apabila berbicara mengenai agresifitas Amerika Serikat, kendati telah 80 tahun agresif, sejak 2013 naluri tempur Amerika Serikat telah surut dilaut China Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Armada VII Indo Pacom hanya “*harassing patrol*” saja. Ditambah lagi dengan hingga saat ini, Amerika Serikat belum berencana membentuk KOGAB (orgas militer temporer melaksanakan Tupok khusus) didalam kepentingan kampanye militer seperti KOGABPAD *Desert Storm / Desert Shield*. Lebih lanjut, berbicara mengenai Garis batas ZEE antara RI vs VIE, dan ZEE antara RI vs MAL hingga saat ini belum *final & binding*.

KEDUANYA MENAHAN DIRI DAN TAK MAU KONTAK SENJATA

RoE dari USA dan China terindikasikan “avoid weapon engagement”. Sehingga naluri Tempur USA berubah 180 derajat, berbeda dengan nalurnya sejak WW 2 yang telah 80 tahun lamanya selalu agresive, seperti : Arena lautan Pasifik (Perang Pasifik) dan Pendaratan Normandia (Eropa), Vietnam War, Grenada assault untuk melengserkan Presiden nya, Serbuan ke Panama untuk menangkap Presiden Noriega karena narkoba saja, Under NATO melaksanakan serbuan ke Bosnia Herzegovina, GULF WAR (dua kali) Desert Storm 1991 dan Iraqi Freedom 2003 menangkap presiden Irak Sadam Hussein dan dihukum gantung di Irak. Tidak hanya sampai disitu saja, pada tahun 2013 USA terlibat di LCS, akan tetapi naluri tempur nya seperti “surut”, karena China memiliki kekuatan yang besar atau perkasa di LCS.

SISTIM DAN FOKUS SARANA PERTAHANAN TNI DI LCS / ZEE

Berbicara mengenai Pertahanan mendalam (cordon-sanitair / defence in depth) sesuai doktrin TNI (Tri Dharma Eka Karma) dan mampu memproyeksikan Alutsista sampai ke ZEE, antara lain :

1. Sarana Pengintai (laut ZEE) : Satelit (LEO) image, Kasel, Pesud Patmar (MPA), Drone

Saran yang diberikan oleh Penceramah adalah sebagai berikut : 1. Diplomasi Indonesia terkait Laut China Selatan hendaknya berirama merdu dan tak gaduh, namun harus dikemas secara bijaksana; 2. Sektor pertahanan perlu ditata secara *defence in depth (cordon sanitair)*, tapi bukan hanya berorientasi pada bakal konflik bersenjata dibidang maritim; 3. Investasi China di Indonesia diteruskan berlangsung karena saling menguntungkan; 4. Segala ikhwal solusi di Laut China Selatan hendaknya didasarkan pada *UNCLOS 82*; dan Garis batas ZEE RI vs VIE, dan ZEE dari RI vs MAL *median line* dibagi dua, namun cermati keluasan area ZEE yang masih *dispute*, tapi RI perlu awali survey (*satelit*)

PERAN KOARMADA-I DALAM GAKKUM DAN GAKLAT DI LAUT NATUNA UTARA



KEPALA STAF KOMANDO ARMADA I
Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han), CHRMP

Koarmada I mempunyai luas wilayah laut sebesar 2,03 juta Km² dimana pada per yuridiksi tersebut terdapat choke point penting jalur pelayaran dunia yaitu : selat malaka, selat Singapore, Laut Natuna dan Selat Sunda. 4 Choke point tersebut sangat rawan terjadinya kegiatan-kegiatan illegal. Dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini, maka dapat ditarik beberapa pointers yang melibatkan peran China yang menjadi negara sangat dominan dalam upayanya untuk menguasai Kawasan Laut China Selatan, termasuk Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari wilayah NKRI.

Dari beberapa upaya China seperti yang disebutkan sebelumnya yang dihadapkan dengan “Peran TNI beserta Komponen Bangsa dalam Menjaga Kedaulatan dan Pengelolaan SDA di Laut Natuna Utara”, dapat ditarik

rumusan permasalahan yang terdiri dari : 1) Bagaimana kesiapan Armada TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan mengelola SDA di wilayah Natuna Utara?; 2) Langkah apa saja yang dilakukan TNI khususnya TNI AL dalam atasi kejahatan maritim (*ocean crime*) di laut Natuna Utara?; 3) Apa strategi dan kebijakan TNI AL dalam hadapi kebijakan pemerintah China di Laut Natuna Utara?

Dalam menjaga kedaulatan dan mengelola SDA di wilayah Natuna Utara, Kesiapan Armada TNI AL antara lain dengan : 1. Menghadirkan 4 unsur Freegate dan 1 oiler di Laut Natuna Utara; 2. Melaksanakan peningkatan Lanal RI menjadi Kodamar; 3. Membangun Gudpurla di Natuna Utara; 4. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder (Pengawasan Maritim dan Opskmla terpadu; dan 5. Menyiapkan beberapa regulasi terkait dengan penegakan hukum sesuai kebijakan yang berlaku. Selain itu, Armada TNI AL juga melaksanakan gelar operasi dalam masa damai, antara lain : 1. Gelar Ops Patkor Indindo-21; 2. Gelar Ops Patkor Optima Malindo-21; 3. Gelar Ops Patkot Malindo-21; 4. Ops Patkor MSSP (Malaka Segara-21); 5. Gelar Ops Pam VVIP (Tameng Segara-21); 6. Gelar Ops Rakata Jaya-21; 7. Ops Pamtas Laut RI-SIN-21; 8. Gelar Ops ALKI-1/Alur Segara-21; 9. Gelar Ops Ops Kamla/Perisai Segara-21, 10. Gelar Ops Slaga Purla/Siaga Segara-21 dan 11. Gelar Ops Pamtas Laut RI-THAI-21.

Kejahatan maritim yang menonjol tahun 2019-2020 di Laut Natuna Utara, terus mengancam kedaulatan NKRI dan menyebabkan kerugian yang sangat banyak terhadap eksploitasi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI AL dalam menghadapi kejahatan maritime tersebut, antara lain : 1. Mengoptimalisasi gelar operasi sesuai dengan RO yang berlaku guna melaksanakan pengendalian laut di Natuna Utara; 2. Meningkatkan kemampuan pengendalian di Laut Natuna Utara; 3. Meningkatkan kemampuan dalam penindakan

pelanggaran di Laut Natuna Utara; 4. Meningkatkan kemampuan pengendalian di LNU; 5. Meningkatkan kemampuan dalam



penindakan pelanggaran di LNU; 6. Meningkatkan kemampuan diplomasi AL

(Naval Diplomacy); 7. Melaksanakan pengawasan secara terpadu dalam mencegah pencurian kekayaan alam; 8. Show Of Force kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI AL; dan 8. Melaksanakan standby force PPRC TNI di Natuna dan memelopori aksi damai melalui kerjasama dengan AL negara di wilayah ASEAN dalam mengantisipasi konflik bersenjata/perang terbuka antara kapal perang. Koarmada I berpedoman kepada kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu : a. We are not claimed state di LCS; b. Indonesia ingin terus menjaga agar Laut China Selatan sebagai laut yang stabil dan damai; dan c. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)”, melaksanakan Declaration of Conduct th 2002, membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama, memelihara perdamaian dan stabilitas di laut China Selatan. c) Menghadirkan nelayan Indonesia di laut Natuna utara; d) Melaks patroli secara bergantian oleh TNI AL, Bakamla, KKP & instansi terkait supaya ada kehadiran negara; e) Menjaga situasi agar tetap kondusif, aman, dan terkendali dengan melakukan ops gakkum, bukan perang; f. Pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kamla yang akan menjadi embrio RUU tentang Kamla; dan g. Mengintegrasikan dan menyatukan komando Kamla. 2) Mempedomani UU No. 1 Tahun 2020 tentang pengawasan pengamanan dan pemanfaatan sumber daya alam di LNU, melalui : a) Penetapan Wilayah pengawasan pengamanan kegiatan tangkap ikan oleh KII adalah di wil ZEEI laut Natuna utara; b. Penetapan Wilayah patroli laut dan udara untuk pengawasan pengamanan batas maritim Indonesia adalah ZEEI laut Natuna utara (garis batas terluar klaim negara RI); c. Melaksanakan

pengawasan pengamanan diluar SKPT Natuna dilakukan oleh Bakamla dan KKP dengan menggunakan kapal patrol dan pesawat udara maritim; d. Melaksanakan Waspam dengan membentuk secara mandiri dalam bentuk Satgas dengan Kodal di bawah Bakamla; e. Perbantuan unsur dan satuan TNI dalam rangka tugas perbantuan pada situasi darurat (force majeure) yang diatur dalam Renkon apabila terjadi insiden antara kapal RI dengan negara lain yang berpedoman pada Rule Of Force (ROF) dan ROE yang berlaku, sedangkan untuk atasi kejadian darurat akan diatur dalam Renkon. Dan Khusus di wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia dan Vietnam, agar berpedoman pada surat Menkopolhukam No. B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23072019 tentang pedoman Gakkum di wilayah tumpang tindih.

Selanjutnya Strategi Pertahanan Laut Nusantara, meliputi : 1. Strategi penangkalan (Deterrence Strategy), melalui diplomasi angkatan laut, kehadiran angkatan laut serta pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL; 2. Strategi pertahanan berlapis (Layer Defence Strategy) dengan mengedepankan pola Opspurlagab matra laut dan udara dengan mengerahkan seluruh kekuatan komponen maritim; 3. Strategi pengendalian laut untuk menjamin penggunaan laut bagi pasukan sendiri, mencegah penggunaan laut oleh lawan serta meniadakan seluruh ancaman aspek laut dari dalam negeri dengan pola operasi laut sehari-hari. Kemudian juga terdapat Strategi dalam menghadapi ancaman maritime, yaitu : 1. Confidence Building Measure (CBM) melalui kapasitas kerjasama antara angkatan laut; 2. Sinergi melalui peningkatan interoperabilitas dengan stakeholder dalam mendukung pelaksanaan tugas Koarmada I; dan Intensif yaitu dengan meningkatkan penegakan hukum sesuai kebijakan pemerintah.





DR. CONNIE RAHAKUNDINI BAKRIE

Visi Presiden Jokowi tentang Poros Maritim Dunia (PMD) atau Global Maritime Fulcrum (GMF) merupakan visi aktualisasi kepentingan Bangsa Indonesia. Dengan sebagai Poros Maritim Dunia menjadi sebuah momentum bagi Bangsa Indonesia yang memposisikan letak dan posisi Indonesia sebagai kekuatan dunia yang berada di antara dua samudera dan menggunakan posisi Geostrategis dan Geopolitik. Hal ini jelas harus didukung dengan kemampuan pertahanan yang unggul melalui TNI yang kuat modern, tangguh, handal, lincah serta memetakan.

Peran TNI Dalam Mendukung PMD Tepat Guna Tepat Sasaran

Sistem pertahanan negara yang tepat guna dan sasaran akan menuntut: 1) Prinsip terciptanya profesionalitas mencakup fungsi, postur dan gelar TNI; 2) Prinsip implementasi pertahanan yang harus mengacu pada alutsista yang dapat dikendalikan, dilakukan serta ditujukan untuk menciptakan perdamaian; dan 3) Prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam perumusan dan implementasi strategi pertahanan. Dalam struktur sistem dari ancaman dimulai dari potensi ancaman yang memiliki sistem pertahanan ancaman. potensi ancaman didukung oleh kesiapan serta logistik taktis ancaman dan daya pendukung (back up troops). Ekspedisi militer Indonesia memiliki dua kesiapan yaitu kesiapan internal dan eksternal.

Pertama, kesiapan internal terdiri dari kesiapan aset utama pasukan komando infantri; MBT, Panzer Amfibi, Ifv Amfibi, pesawat tempur serang, helikopter serbu dan drone serbu, kesiapan aset sekunder; helikopter angkut, LST, hovercraft, drone intai serta kesiapan tersier zeni konstruksi, zeni tempur, medik dsb). Kesemua ini harus didukung oleh stok logistik taktis. Kedua, kesiapan eksternal

terdiri dari kesiapan aset laut strategis (kapal perang dan angkut pasukan) dan kesiapan aset udara (pesawat tempur superioritas udara, pesawat serang, pembom, pernaka, awacs dan lintas udara). Stok logistik strategis mendukung stok logistik taktis namun memakan waktu tertentu (jeda waktu).

Ambisi sebagai negara PMD harus didasarkan pada revisi jalur sejarah maritim perdagangan dan militer yang terkenal abad abad lalu. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi dan roadmap yang terukur dan sempurna. Serta didukung Postur Pertahanan yang mampu menyangkal (Denial) ancaman dan gangguan keamanan di wilayah Yuridiksi Laut Indonesia, wilayah/ruang udara Yuridiksi Indonesia, wilayah perbatasan, dan Choke Point Strategis. Sehingga TNI berkewajiban mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas kepentingan nasional sesuai dengan peran tugas dan fungsinya.



pelanggaran di Laut Natuna Utara; 4. Meningkatkan kemampuan pengendalian di LNU; 5. Meningkatkan kemampuan dalam penindakan pelanggaran di LNU; 6. Meningkatkan kemampuan diplomasi AL (Naval Diplomacy); 7. Melaksanakan pengawasan secara terpadu dalam mencegah pencurian kekayaan alam; 8. Show Of Force kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI AL; dan 8. Melaksanakan standby force PPRC TNI di Natuna dan memelopori aksi damai melalui kerjasama dengan AL negara di wilayah ASEAN dalam mengantisipasi konflik bersenjata/perang terbuka antara kapal perang. Koarmada I berpedoman kepada kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu : a. We are not claimed state di LCS; b. Indonesia ingin terus menjaga agar Laut China Selatan sebagai laut yang stabil dan damai; dan c. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)", melaksanakan Declaration of Conduct th 2002, membangun rasa saling percaya, meningkatkan

kerjasama, memelihara perdamaian dan stabilitas di laut China Selatan.

c) Menghadirkan nelayan Indonesia di laut Natuna utara; d) Melaksanakan patroli secara bergantian oleh TNI AL, Bakamla, KKP & instansi terkait supaya ada kehadiran negara; e) Menjaga situasi agar tetap kondusif, aman, dan terkendali dengan melakukan ops gakkum, bukan perang; f) Pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kamla yang akan menjadi embrio RUU tentang Kamla; dan g) Mengintegrasikan dan menyatukan komando Kamla.

2) Mempedomani UU No. 1 Tahun 2020 tentang pengawasan pengamanan dan pemanfaatan sumber daya alam di LNU, melalui :

a) Penetapan Wilayah pengawasan pengamanan kegiatan tangkap ikan oleh KII adalah di wil ZEEI laut Natuna utara; b) Penetapan Wilayah patroli laut dan udara untuk pengawasan pengamanan batas maritim Indonesia adalah ZEEI laut Natuna utara (garis batas terluar klaim negara RI); c) Melaksanakan pengawasan pengamanan diluar SKPT Natuna dilakukan oleh Bakamla dan KKP dengan menggunakan kapal patrol dan pesawat udara maritim; d) Melaksanakan Wasparam dengan membentuk secara mandiri dalam bentuk Satgas dengan Kodal di bawah Bakamla; e) Perbantuan unsur dan satuan TNI dalam rangka tugas perbantuan pada situasi darurat (force majeure) yang diatur dalam Renkon apabila terjadi insiden antara kapal RI dengan negara lain yang berpedoman pada Rule Of Force (ROF) dan ROE yang berlaku, sedangkan untuk atasi kejadian darurat akan diatur dalam Renkon. Dan Khusus di wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia dan Vietnam, agar berpedoman pada surat Menkopolkam No. B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23/07/2019 tentang pedoman Gakkum di wilayah tumpang tindih.

Selanjutnya Strategi Pertahanan Laut Nusantara, meliputi : 1. Strategi penangkalan (Deterrence Strategy), melalui diplomasi angkatan laut, kehadiran angkatan laut serta pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL; 2. Strategi pertahanan berlapis (*Layer Defence Strategy*) dengan mengedepankan

pola Opspurlagab matra laut dan udara dengan mengerahkan seluruh kekuatan komponen maritim; 3. Strategi pengendalian laut untuk menjamin penggunaan laut bagi pasukan sendiri, mencegah penggunaan laut oleh lawan serta meniadakan seluruh ancaman aspek laut dari dalam negeri dengan pola operasi laut sehari-hari. Kemudian juga terdapat Strategi dalam menghadapi ancaman maritime, yaitu : 1. Confidence Building Measure (CBM) melalui kapasitas kerjasama antara angkatan laut; 2. Sinergi melalui peningkatan interoperabilitas dengan stakeholder dalam mendukung pelaksanaan tugas Koarmada I; dan Intensif yaitu dengan meningkatkan penegakan hukum sesuai kebijakan pemerintah.



Dr. Wawan Budi Darmawan, S.IP., M.Si

Nine dash line terkait dengan laut Natuna Utara, bukan merupakan sengketa kedaulatan (sovereignty), melainkan sengketa wilayah hak berdaulat sovereign rights. Maka kemungkinan ancaman yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara ialah berkaitan dengan sengketa eksploitasi dan pengelolaan sumber daya.

Sinergisitas Pemangku Kepentingan

Belajar dari China, terkait NDJ sebagai kepentingan nasionalnya, strategi yang digunakan melalui cara seperti: 1) Publikasi Jurnal, 2) penyebaran informasi melalui produk-produk ekspor, dan 3) penggunaan media elektronik. Strategi tersebut sebagai langkah China untuk menggalang dukungan semua warga negaranya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Permasalahan sinergi Pemangku

Kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Nasional guna menjaga Kedaulatan NKRI di wilayah laut Natuna Utara. Adapun Isu Permasalahan yang berkembang seperti: 1) *Illegal, Undocumented and Unreported Fishing* ataupun Ancaman Keamanan Non tradisional seperti : Illegal Migrant Ancaman lingkungan maritime (Polusi dan keselamatan pelayaran); pembajakan dan perampokan maritim , Penyelundupan senjata , obat obatan dan satwa liar); 2) Kesenjangan Standar Operasi Prosedur antar Lembaga dan badan pelaksana keamanan dan Tumpang tindih aturan perundang undangan; dan 3) Kemampuan teknologi dalam pengawasan dan penginderaan jarak jauh, serta dukungan personel dan alutsista.

Strategi Sinergi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional Guna Menjaga Kedaulatan NKRI di Wilayah Laut Natuna Utara

Langkah-langkah Strategi yang dapat dilakukan, seperti: 1) Peningkatan interoperabilitas diantara pemangku kepentingan dengan berbasis teknologi informasi; 2) Adanya leading sector keamanan laut yang terintegrasi; 3) Mengoptimalkan kerjasama antar negara ASEAN; dan 4) Bakamla sebagai lembaga pemerintah Indonesia yang ada dalam ACF harus dapat memainkan peran utama baik dalam tataran konseptual maupun praktis.

Dengan adanya berbagai pihak yang memiliki kepentingan nasional kemungkinan ancaman yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara ialah berkaitan dengan sengketa eksploitasi dan pengelolaan sumber daya. Sehingga, sinergisitas para pemangku kepentingan di wilayah Laut Natuna Utara sangat diperlukan. Untuk mengaktualisasikan sinergisitas tersebut maka diperlukan strategi Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional guna Menjaga Kedaulatan NKRI di Wilayah Laut Natuna Utara.

AKTUALISASI SINERGI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA



Pendahuluan

Kedaulatan suatu Negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang fundamental sebagai salah satu syarat

dalam Negara, kedaulatan suatu Negara sangat diperlukan supaya Negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan Negara lain. Maka dari itu, dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan juga keutuhan wilayah, tentunya tidak terlepas dari usaha bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Dengan kekayaan alam yang ada di Natuna, menjadi potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat . Dalam hal ini, peran Pemerintah (government will) dibutuhkan untuk bisa menjaga, mempertahankan serta memanfaatkan kekayaan dan potensi maritim di Indonesia agar bisa memberi keuntungan ekonomi bagi negara dan juga bagi masyarakat (prosperity approach).

Mengalir dari penjelasan di atas bahwa kondisi pemberdayaan potensi maritim di Kepulauan Natuna saat ini dirasa masih belum optimal dikarenakan ada beberapa persoalan yang harus segera ditindaklanjuti yaitu belum optimalnya kebijakan pemberdayaan potensi maritim di kepulauan Natuna, belum selesainya penyelesaian batas maritim ZEE RI di Laut Natuna Utara, minimya tingkat kehadiran nelayan RI dalam pemanfaatan SDA di Laut Natuna Utara, dan belum optimalnya sinergitas penegakkan hukum di Laut. Hal ini tentu memberikan implikasi terhadap pengamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional belum terdukung dan kedaulatan wilayah NKRI belum mantap terjaga. Para pemangku kepentingan saat ini harus bersinergi dalam upaya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka sinergitas dan pelibatan TNI dan Komponen Bangsa lainnya untuk menghadapi ancaman dan gangguan serta klaim sepihak China atas Laut Natuna Utara perlu diaktualisasikan secara optimal. Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka yang diangkat. Adapun

perumusan masalah yang ada yaitu, pertama, Bagaimana kerjasama lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya nasional di Wilayah Laut Natuna Utara? Dan kedua, Bagaimana kebijakan dalam pengelolaan sumber daya nasional di wilayah Laut Natuna Utara?

Landasan Pemikiran

Pemberdayaan sumber daya Nasional berupa potensi maritim di Kepulauan Natuna merupakan pemikiran strategis yang dituangkan berdasarkan tinjauan pustaka sebagai hasil penelitian tentang pemberdayaan potensi maritim yang ada saat ini di wilayah LNU khususnya konstalasi ancaman geopolitik di Laut Natuna Utara yang disebabkan agresifitas dari China di wilayah tersebut. Dengan pendekatan paradigma nasional, landasan yuridis dan landasan teori dan landasan kepustakaan ini diharapkan akan didapat suatu alat analisis yang memenuhi kaidah-kaidah akademis untuk menemukan pemecahan permasalahan belum optimalnya pemberdayaan potensi maritim di Kepulauan Natuna, dimana dalam penulisan naskah ini landasan pemikiran terdiri dari pertama, landasan Normatif yang terdiri dari berbagai regulasi dan landasan hukum yang relevan. Kedua, landasan teoritis yang terdiri dari teori aktualisasi, teori sinergisitas, teori dilema keamanan, teori analisis SWOT dan landasan empiris yang penulis ambil dari berbagai penelitian ilmiah terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pembanding dalam penulisan naskah seminar ini



"War most often promotes the internal unity of each state involved. The state plagued by internal strife may then, instead of waiting for the accidental attack, seek the war that will bring internal peace."
-Kenneth Waltz

Kerjasama lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya nasional di Wilayah Laut Natuna Utara

Saat ini kondisi kerjasama lintas sektoral Pemangku kepentingan belum sepenuhnya di aktualisasikan secara optimal dalam pengelolaan sumber daya nasional di Laut Natuna Utara. Oleh karenanya, para pemangku kepentingan seperti, institusi militer (TNI) maupun institusi non militer (Sipil) baik dari jajaran pemerintah maupun kalangan swasta harus dapat mengintegrasikan langkah - langkah penanganan kejahatan lintas negara, sehingga diharapkan dapat terwujud suatu sinergisitas dan keterpaduan dalam setiap langkah perencanaan, persiapan, pelaksanaan/ pengendalian maupun dalam evaluasi penanganan kejahatan lintas negara. Melalui keterpaduan instansi militer dan non militer tersebut maka kesolidan, kekompakan serta efektivitas dalam penanganan kejahatan lintas negara dapat diwujudkan.

Maka dari itu, dalam menganalisa Kerjasama lintas sektoral pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya nasional di wilayah Laut Natuna Utara, maka pertama kami akan menggunakan teori sinergisitas. Dalam teori sinergisitas menurut Hampden-Turner menegaskan bahwa sinergi merupakan hasil dari relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Dengan demikian, Hartanto mengartikan sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan gagasan (kebijakan) baru. Menurut Najianti, terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas, yaitu; komunikasi dan koordinasi, yakni pertama, Komunikasi, Silalahi menyampaikan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu berkerja ke arah tujuan bersama. Dari penjelasan mengenai teori sinergisitas tersebut dan juga dikaitkan dengan fenomena kondisi nyata yang ada mengenai Kerjasama

lintas sektoral Pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya nasional di Wilayah Laut Natuna Utara dapat dikatakan belum maksimal karena belum memenuhi beberapa aspek dalam sinergisitas. Sehingga diperlukan upaya mengelola sumber daya nasional di wilayah Laut Natuna Utara dengan mengoptimalkan sinergisitas para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut, yaitu Pemerintah Pusat yang terdiri dari beberapa kementerian terkait, TNI khususnya TNI Angkatan Laut dan juga Pemerintah Daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya nasional di wilayah Laut Natuna Utara.

Dihadapkan kebijakan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya nasional di wilayah Laut Natuna Utara yang belum optimal dikarenakan beberapa kendala. Sehingga, dalam upaya mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan cara pertama, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan Kerjasama luar negeri dengan beberapa negara kuat seperti Amerika Serikat atau Rusia yang memiliki hubungan baik dengan China. Berdasarkan teori neorealisme dari Kenneth Waltz yang menghendaki setiap negara menjalin Kerjasama dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Lalu, dilanjutkan dengan dikaitkan pada teori Balance of Power sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Maka dari itu, Indonesia dapat menjalin Kerjasama yang intensif dengan negara yang memiliki power yang kuat guna mengimbangi kekuatan China di kawasan yang dipersengketakan.

Kemudian aktualisasi lain yang sudah dilaksanakan adalah dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara maka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan

pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.



Dalam kerangka tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan visi “mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Untuk mewujudkan visi KKP tersebut diharapkan tata kelola perikanan di WPP NRI 711 Laut Natuna Utara dapat meningkatkan 3 (tiga) pilar sebagai misi dari kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dan dihasilkan, maka gagasan Inovasi yang dapat diimplementasikan terkait rumusan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam mulai menyusun regulasi secara terpadu terkait dalam pengelolaan SDN khususnya di Laut Natuna Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan NKRI.
- b. Kementerian ESDM memulai perencanaan eksploitasi sumber daya minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara. Namun jika teknologi belum siap, maka dibuat terlebih dahulu dummy eksplorasinya untuk mewujudkan penguasaan Indonesia terhadap Wilayah tersebut.

- c. Kementerian KKP mulai mengimplemantasikan konsep nelayan terpadu dengan dukungan kapal-kapal yang dilengkapi peralatan seperti echo sounder, brean trawl, satelit navigasi sistem, fish finder, sonar penangkap ikan, sea glidder dan kapal pukat hela sehingga proses penangkapan ikan lebih efektif dan efisien dan dikawal oleh Bakamla sebagai pengamanan.
- d. Mabes TNI merencanakan pelibatan Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) sebagai garda terdepan dalam mendukung nelayan-nelayan di Wilayah Laut Natuna Utara. Babinpotmar tersebut dibekali dengan kemampuan seputar kelautan, untuk dapat mendampingi nelayan di laut sekaligus sebagai badan pengumpul keterangan akan adanya pelanggaran di Wilayah Laut Natuna Utara. Lebih penting lagi, Babinpotmar tersebut memberikan rasa aman dan percaya diri bagi nelayan dalam pelaksanaan kegiatan pencarian ikan di Wilayah Laut Natuna Utara.
- e. Kabupaten Natuna melaksanakan pendataan nelayan yang siap untuk melaut dan di wilayah Laut Natuna Utara dengan mengorganisir Nelayan dalam wadah usaha sejenis Koperasi. Kekurangan nelayan dari Kepulauan Natuna akan dilengkapi dari daerah-daerah lain di Indonesia melalui Program Kampung Nelayan di Natuna.
- f. Kemendagri membuat regulasi tentang pemekaran khusus untuk Kabupaten Natuna menjadi Provinsi dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah prioritas utama, sehingga dengan pemekaran wilayah menjadi sebuah solusi dalam memberdayakan wilayah Natuna.

Kesimpulan

"All warfare is based on deception. Hence, when we are able to attack, we must seem unable; when using our forces, we must appear inactive; when we are near, we must make the enemy believe we are far away; when far away, we must make him believe we are near."

-Sun Tzu

Dalam rangka mengatasi permasalahan nelayan-nelayan Indonesia yang kesulitan dalam menghadapi terjangan ombak di Laut Natuna Utara, dapat diatasi dengan adanya dukungan Kapal-kapal besar. Adapun dalam pembuatan kapal-kapal besar ini dengan memanfaatkan SDN seperti PT. PAL, dll. Lalu, apabila kapal-kapal tersebut sudah ada, maka Langkah selanjutnya adalah dengan dilakukan pengawalan dan pengawasan oleh Bakamla dan juga TNI AL. Peran lain yang dapat di implementasikan oleh TNI adalah dengan melibatkan Babinpotmar TNI AL sebagai yang berperan mendorong nelayan untuk melaksanakan pencarian ikan di LNU, dengan cara mendampingi Nelayan di Kapal-kapal Ikan Besar agar timbul keberanian melakukan penangkapan ikan. Kemudian perlunya optimalisasi Eksploitasi SDA Migas di wilayah Natuna Namun apabila belum bisa di aktualisasikan, sementara diwujudkan dengan Instalasi-instalasi samaran/tipuan untuk mengelabui pihak asing bahwa di wilayah Laut Natuna Utara sudah ada aktifitas eksploitasi SDA besar-besaran yang dilakukan Indonesia, hal ini berguna untuk menegaskan bahwa Indonesia juga sedang memanfaatkan potensi SDA di LNU.

Saran kepada Kepala Staf Angkatan Darat

- a. Mendorong Menteri Luar Negeri agar meningkatkan kerjasama dengan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografis TNI AL untuk melaksanakan kaderisasi dengan menyiapkan dan melatih negosiator muda.
- b. Mendorong Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan agar terus memonitor dan mewaspadaai upaya-upaya Cina untuk mewujudkan keinginannya karena saat ini China tidak pernah lagi mengutarakan tentang nine-dashed line maupun traditional fishing ground di Laut Cina Selatan pasca putusan Permant Court of Arbitration (PCA).
- c. Mendorong Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta

Kabakamla agar meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan Melaksanaan Optimalisasi Gelar Kekuatan sebagai efek deterrence.

- d. Mendorong Menkopolkam sesuai kewenangannya untuk mengoptimalkan Sinergi lintas sektoral Para Pemangku Kepentingan.
- e. Mendorong Mendagri melalui Kewenangannya diharapkan dapat mengimplementasikan Pemekaran Natuna menjadi Provinsi Khusus.
- f. Mengajak semua pemangku kepentingan diharapkan untuk melaksanakan Total Diplomacy dan Maritime Defense Diplomacy Grand Strategy.
- g. Mengajak semua pemangku kepentingan perlunya bersinergi untuk Optimalisasi Sumber Daya Nasional di bidang SDM.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan di Wilayah Laut Natuna Utara, apabila semua gagasan inovasi tersebut terlaksana maka gangguan terhadap kedaulatan wilayah yurisdiksi di Wilayah Laut Natuna Utara akan segera terselesaikan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sumberdaya kelautan dan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Likadja, Frans E. 1988. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 94

Kusumaatmadja, Mochtar 1996. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit Alumni Press,

Naskah Departemen Sostek seskoad Nomor Kep/100/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Sub bidang studi Teknik dan Proses Analisis.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Arief Bakhtiar Darmawan & Lady Mahendra, 2018. *Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok*, *Jurnal Global & Strategis*, Th. 12, No. 1.

Artikel Ilmiah dengan Judul : *China's "Militarisation" in the South China Sea: Three Target Audiences.*

Artikel Ilmiah dengan Judul : *Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power.*

Artikel Ilmiah dengan Judul : *Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia Di Laut Natuna Utara.*

<http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antaraarticle-10910-media-138-category-8.html>

Humphrey Wangke, *Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia Di Laut Natuna Utara*, h.8

Undang-undang/Peraturan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan.

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) TA 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Pasal 73 UNCLOS

Internet



BRIGJEN TNI DRS. AGUNG ZAMANI, M.SC

**SINERGI APARATUR PENEGAK HUKUM GUNA MEWUJUDKAN NKRI
SEBAGAI NEGARA HUKUM**

Latar Belakang.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa ; “Negara Indonesia adalah negara hukum,”¹ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (supremacy of law). Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol/pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan adil dengan jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antar subjek hukum.

Sebelum amandemen perubahan terhadap UUD 1945 pernyataan landasan konstitusional Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yakni terdapat tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia, antara lain (1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*).² Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum merupakan tatanan kehidupan nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di Indonesia hukum dibuat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam penegakan hukum di Indonesia masih terjadi masalah seperti ketidak mampuan suatu lembaga

keadilan dalam memberikan keadilan itu sendiri bagi masyarakat. Keadilan dianggap suatu yang sulit untuk didapatkan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang tidak mampu dari segi materi. Karena di lapangan banyak kasus terjadi melibatkan masyarakat kelas bawah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita sehingga *justice for all* (keadilan untuk semua) berubah menjadi *justice not for all* (keadilan untuk tidak semua). Hukum di negara kita seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat, tetapi terkesan tajam ke bawah kepada rakyat miskin, tetapi tumpul ke atas terhadap mereka yang mempunyai uang.

Kondisi di atas akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kepada rasa keadilan, dan legitimasi kepada pemerintah menurun karena menganggap seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, jabatan, dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya. Penyelenggara negara diharapkan antara lain sebagai berikut: (a) Menjadikan masyarakat sebagai tujuan pembangunan, yakni bahwa pembangunan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat; (b) Tidak menjadikan rakyat sebagai sumber pendapatan negara; (c) Mengupayakan semaksimal mungkin kekayaan alam NKRI sebagai sumber pendapatan negara, bukan pendapatan pihak tertentu; dan (d) Penegakan hukum. Dengan demikian, tujuan negara hukum tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan dalam keadilan sosial melalui upaya pembangunan nasional.

1. <https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>

2. *Ibid*

Tiga prinsip dasar yang harus dijalankan dalam negara hukum adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan. Penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum antara lain kekuasaan kehakiman dan para aparatur penegak hukum lainnya seperti diatur dalam pasal 24 UUD 1945, yang memiliki kekuasaan kehakiman, adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, beserta empat pengadilan di bawah MA yaitu peradilan umum, peradilan agama, PTUN, dan Peradilan Militer. Namun kenyataannya sampai saat ini masih terjadi dalam penegakan hukum adanya tarik-menarik kepentingan politis/kelompok/instansi tertentu sehingga akan melemahkan proses penegakan hukum itu sendiri yang akan mengakibatkan melemahnya sinergitas antara aparat penegak hukum dan juga dapat memperlemah negara kita sebagai negara hukum.

2. Pembahasan.

Sinyalemen penegakan hukum di Indonesia sangatlah memprihatinkan, terutama tindak pidana korupsi, keadilan bagi masyarakat Indonesia yang bersifat sistemik dan memunculkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Keprihatinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah menghadirkan refleksi dengan tema Penegakan Hukum antara Cita dan Fakta. Artidjo Alkostar mengungkapkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kewibawaan suatu negara. Apabila penegakan hukum suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh.³

Penciptaan penegakan hukum memerlukan kerja sama antar aparat penegak hukum, terlebih upaya dalam menjalankan penegakan hukum di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara. Namun, terkadang hasil temuan BPK baik yang bersifat administratif maupun pidana yang dilimpahkan ke KPK terkadang tidak sepenuhnya untuk

ditinjaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).⁴ Dalam menjalankan fungsinya BPK telah menjalin kerja sama dengan KPK dan Kepolisian RI. Persoalan tersebut perlu sebuah pengawasan yang baik, sehingga penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan.

Selain temuan BPK yang sering tidak ditindaklanjuti oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya maka masalah krusial yang sebenarnya terjadi adalah anggapan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan pihak pejabat penegak hukum seperti halnya kepolisian sebagai aparat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan, pihak kejaksaan dan pihak kehakiman sebagai pengambil keputusan. Masalah opini akan berpengaruh buruk terhadap hukum di mata masyarakat kepolisian sering dianggap terlalu arogan dalam melaksanakan penyidikan, demikian juga terhadap lembaga kejaksaan dan kehakiman dianggap telah melakukan kesalahan prosedur. Opini yang timbul di masyarakat apakah para pejabat mampu menyelesaikan masalah yang timbul dengan menempatkan hukum hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau secara seadil-adilnya. Termasuk dalam berusaha memecahkan masalah dan menyelesaikan sebuah konflik maka harus bersifat adil dan berlandaskan asas praduga tak bersalah dan tidak menempatkan hukum hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Berdasarkan analisis penulis maka permasalahan hukum dan kompleksitas masalah dalam penegakan hukum antara lain ditimbulkan oleh sistem peradilannya, perangkat hukumnya, tidak konsistennya penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang dirasakan masyarakat awam adalah adanya ketidakpastian penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dalam proses penyidikan kepolisian apakah para tersangka dan para korban sudah dilindungi oleh hukum, apakah juga hukum yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan hukum itu sendiri.

3. <https://andreiblantan.wordpress.com/upaya-penegakan-hukum-dan-mengembalikan-kepercayaan-nmasyarakat-terhadap>.
4. Abdul Rachman Thaha dalam www.lintas.parlemen. 30 Maret 2017.

Masyarakat terlalu sering bersikap skeptis, apatis, dan mencurigai atas perlakuan dan kesaksian dalam proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang dilakukan dengan menjunjung moral yang baik.

Masyarakat awam hendaknya juga memahami bagaimana hukum saat ini berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi unsur-unsur sebagai berikut, (1) hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, (2) dibuat oleh badan yang berwenang, (3) bersifat memaksa walaupun tidak bisa dipaksakan, dan (4) disertai sanksi yang tegas. Unsur di atas hendaknya dipegang masyarakat agar mereka paham mengapa hukum itu dibuat, dan atas dasar kepentingan apa hukum itu dibuat. Satipto Rahardjo memberikan solusi bahwa dalam penyelesaian masalah khususnya masalah hukum itu sendiri adalah dengan bertumpu pada prosedur, bekerja secara prosedural.⁵

Sejauh ini praktek penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti halnya mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif, rekayasa peradilan merupakan realitas yang dengan mudah ditemui dalam penegakan hukum dinegeri ini. Hukum yang dijalankan tidak sesuai ketentuan dan tidak prosedural maka akan menciderai rasa keadilan masyarakat, secara panjang akan mempertaruhkan legitimasi pemerintah di mata rakyat, menimbulkan ancaman anarkis dan kekerasan kontraproduktif terhadap pembangunan bangsa.

3. Pokok-Pokok Persoalan dan Upaya Pemecahan Masalah.

Yang terjadi sampai saat ini antara lain, adalah (a) Belum tersedianya blue print hukum yang benar-benar cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia; (b) Belum tercapainya harmonisasi dan iklim kondusif dari unsur aparat penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Kehakiman); (c) Sikap mental masyarakat Indonesia untuk taat asas dan mengikuti prosedural dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menganggap penegak hukum sebagai pribadi dan mengidentifikasi sebagai petugas sehingga baik buruknya hukum dikaitkan dengan perilaku dan sikap aparat penegak hukum; dan (d) Terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (expertise) organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dsb. Jumlah gaji yang tinggi

Belum tersedianya blue print hukum yang benar-benar cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Terhadap permasalahan di atas yang perlu dilakukan antara lain adalah: (a) Kementerian Hukum dan HAM menginisiasi dan segera menyusun produk hukum berupa blue print yang mampu mengakomodasi sistem hukum di Indonesia yang terpadu termasuk mengakomodasi hukum adat dan disesuaikan dengan budaya manusia Indonesia (selama ini hukum kita produk “tinggalan” Belanda); (b) Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan perguruan tinggi melakukan riset dan fungsi litbang bagi pengembangan hukum di Indonesia; (c) Segera menerbitkan Perpres yang mengamatkan penyusunan sistem hukum keindonesiaan dengan membentuk kelompok kerja yang diisi tokoh nasional terkait dengan masalah utama.

Belum tercapainya harmonisasi dan iklim kondusif dari unsur aparat penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Kehakiman). Yang perlu dilakukan adalah (a) Kementerian Hukum dan HAM selalu berkoordinasi dengan unsur aparat penegak hukum yang meliputi Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional dan terpercaya; (b) Pemerintah menyusun rencana adanya forum komunikasi ketiga unsur aparat penegak hukum Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman, dengan melibatkan KPK dalam menciptakan sinergitas dan iklim kondusif bagi penyelenggaraan hukum di satuan; (c) Pemerintah secara sinergis dengan Kementerian/Lembaga terkait mengkoordinir dan mengawasi penegakan hukum secara

bertahap dan berjenjang sesuai dengan kompleksitas masalah.

Sikap mental masyarakat Indonesia untuk taat asas dan mengikuti prosedural dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menganggap penegak hukum sebagai pribadi dan mengidentifikasi sebagai petugas sehingga baik buruknya hukum dikaitkan dengan perilaku dan sikap aparat penegak hukum. Maka yang harus dilakukan adalah (a) Diperlukan adanya perangkat lunak yang bersifat mengatur dari Pemerintah mengenai tujuan dan manfaat hukum dibuat kepada masyarakat, sehingga timbul dorongan untuk taat hukum dan taat asas terhadap hukum yang berlaku; (b) Pemerintah dengan kementerian terkait secara periodik dan insidental menyelenggarakan penyuluhan hukum agar diperoleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik bagi peran individu dalam proses penegakan hukum.



Terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (expertise) organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dsb. Jumlah gaji yang tinggi. Maka yang dilakukan adalah: (a) Pemerintah dan Menteri Keuangan menerbitkan Perpres tentang kenaikan gaji dan tunjangan bagi aparat penegak hukum melalui pengawasan ketat dan akuntabilitas publik yang bonafit; (b) Pemerintah melalui Menteri terkait menyediakan tenaga manusia yang ahli dan terlatih dalam bidang sesuai tuntutan kebutuhan; (c) Pemerintah menyediakan anggaran yang memadai untuk membangun sistem peradilan dan penegakan hukum secara konsisten.

4. Penutup.

Suatu negara yang kuat akan sangat dipengaruhi oleh upaya penegakan hukum di wilayahnya sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terjamin dalam pembangunan bangsa. Diperlukan blue print hukum yang memadai sesuai dengan bangunan karakteristik manusia Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Penegakan hukum sangat berkait dengan ketaatan masyarakat dan akan secara signifikan berdampak langsung pada timbulnya rasa keadilan dan legitimasi rakyat terhadap pemerintah saat ini, sehingga kondisinya sangat krusial perluantisipasi dan pengawasan secara terus-menerus.



Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc adalah abituren Sepa Wamil 1990 dan lulusan Seskoad 2005. Saat ini menjabat sebagai Widyaiswara bidang Strategi dan Kawasan Seskoad.



BRIGJEN TNI FULAD, S.SOS, M.SI. (WADAN SESKOAD)

URGENSI PERENCANAAN DALAM ORGANISASI SESKOAD (Sebuah Catatan Renungan)

Dalam mewujudkan TNI Angkatan Darat ke depan yang profesional di abad 21 yang penuh dengan dinamika dan tantangan yang silih berganti, diperlukan sebuah perencanaan yang teliti, jeli, dan mengikuti dinamika global. Sekilas flashback ke belakang beberapa saat yang lalu, bagaimana US Army menggunakan teknologi yang canggih untuk bertempur, tanpa menggunakan kehadiran pasukan yang masif. Oleh sebab itu, sebagai insan yang ditugaskan di lembaga pendidikan Seskoad tidak terlepas dari sebuah perencanaan untuk menemukan ide dan gagasan yang besar.

Berbicara perencanaan, tidak saja menghitung anggaran, tetapi bagaimana membangun sumber daya manusia sebagaimana yang sekarang digalakkan oleh Angkatan Darat. Bagaimana sumber daya manusia yang akan mengawaki Indonesia 100 tahun yang akan datang mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. TNI AD diharapkan menjadi penjuror untuk perubahan yang besar di Indonesia. Sudah saatnya kita untuk aktif memberikan masukan, ide, dan gagasan. Dari ide dan gagasan tersebut bisa menjadi masukan yang berharga bagi kemajuan bangsa dan negara.

Perencanaan merupakan otaknya organisasi modern dan TNI AD membutuhkan perwira-perwira yang brilian. Sekarang zamannya 4.0. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti perubahan tersebut. Penggunaan IT, perkembangan dunia yang semakin cepat dihadapkan dengan tantangan berat terutama di bidang ekonomi yang sekarang sedang hampir memukul semua negara. Oleh sebab itu,

road map TNI AD pada abad 21 seperti apa, dengan adanya wabah Corona ini. Melalui pendidikan di Seskoad, TNI AD menaruh perhatian besar bagi Seskoad untuk menemukan ide dan gagasan dalam rangka mengembangkan TNI AD yang adaptif dan modern.

Apa sih yang menjadi persoalan besar dari sebuah perencanaan? Apa sih permasalahan besar yang kita hadapi saat ini untuk memajukan TNI AD yang maju, modern, dan adaptif. Saat ini TNI AD sedang mengisi organisasi dengan orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Perencanaan yang baik, sebagaimana diketahui adalah setengah keberhasilan, maka apa pun dan di mana pun tugasnya, perencanaan itu menjadi kunci yang urgen. Ada 8 (delapan) komponen dalam aspek perencanaan, sebagai berikut :**Pertama**, adalah kebijakan rencana strategis; **Kedua**, adalah manajemen. Kalau berbicara manajemen, maka kita bicara tentang organisasi, aturan termasuk gelar satuan Angkatan Darat, karena itu menjadi satu siklus bagaimana Angkatan Darat menggelar organisasi, memberikan aturan dan pengembangan. **Ketiga**, bagian dari perencanaan yang tidak kalah penting adalah Litbang, sebagai Litbang strategis karena Litbang akan melihat bagaimana perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kemudian dioper ke Litbang, yang akan menilai apakah efektif, dan berjalan dengan baik; **Keempat**, adalah rencana program dan anggaran yang mendukung majunya, yang akan mendukung pemenuhan kebutuhan baik Alutsista, materiil maupun yang lainnya;

Kelima, setelah ada program, tentunya ada pengendalian agar tepat guna dan tepat sasaran. Sekarang kita sedang belajar menuju bagaimana anggaran itu tepat guna, efisien, efektif sehingga Angkatan Darat semakin maju. Yang lalu-lalu barangkali ada penyimpangan-penyimpangan, kita harus hindari. Kalau kita secara terus-menerus membiarkan adanya penyimpangan cepat atau lambat kita akan terjebak dengan biaya besar dan tentunya merugikan negara; **Keenam**, adalah pelaksanaan anggaran; **Ketujuh**, yang menjadi “konsen” baik dari Angkatan Darat maupun pemerintah yaitu reformasi birokrasi; dan **Kedelapan**, yang sedang kita alami saat ini, di masa pandemi kita harus mampu untuk menggunakan sistem informasi terkait kebijakan rencana strategis, kita berbicara tentang rencana tahunan, rencana tahunan ini apakah kaitan dengan pengisian intelijen, pengisian materiil, kemudian bagaimana terkait dengan *operation*? Kenapa prajurit kita di Papua masih saja terjadi korban, apakah salah kepemimpinan atau tidak disiplin, apakah latihannya yang tidak tepat, itu selalu dievaluasi oleh Staf Operasi, oleh para komandan, termasuk juga fungsi Litbang karena beberapa saat yang lalu ada prajurit kita yang gugur, dengan berbagai sebab. Ini yang harus terus dievaluasi.

Bagi Perwira yang menduduki staf perencanaan juga ada fungsi dan bagian di situ. Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun ini mau seperti apa, kita sekarang melihat Angkatan Darat berkembang seperti apa, baik dari unsur para perwira tingginya, pengembangan organisasi, penambahan termasuk kebutuhan Alutsista, termasuk kebutuhan sarana interaksi kendaraan perumahan dan seterusnya dan khususnya yang paling berat adalah kebutuhan biaya untuk bayar pegawai dan pembangunan jangka panjang 20 tahun. Setelah saya tanya dan diskusi dengan orang perencanaan apa itu sih tantangan terbesar? Mereka mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan kekuatan pembangunan kekuatan kita, sekarang TNI AD sedang

dibesarkan, oleh sebab itu yang mengawaki harus benar-benar orang-orang yang mempunyai konsen memajukan Angkatan Darat.

Saya yakin dan percaya pimpinan mengambil keputusan itu berdasarkan perkiraan, berdasarkan penilaian terhadap ancaman, dan kebutuhan pengembangan. Oleh sebab itu kita yang ada dibawahnya harus bisa mendukung, walaupun beberapa saat yang lalu ada perencanaan yang berubah ubah, kita sesuaikan dengan kondisi yang dinamis, karena organisasi kita adalah organisasi dinamis. Tidak pernah Batalyon mencapai full 100%, ada diantaranya 85, 87, 90 hal tersebut bisa naik turun karena kalau sudah 100% maka akan terjadi stagnan dalam peningkatan, baik itu karier, pendidikan dst. Oleh sebab itu, tantangan-tantangan dengan adanya dokumen ataupun program yang berubah tidak usah kaget dan harus cepat menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan dan dibutuhkan pimpinan

Seskoad ini memerlukan pengisian personel, pengisian materiil, dan *job description*. Oleh sebab itu, perencanaan itu juga harus mempunyai sifat sebagai saran dan masukan, termasuk penilaian terhadap bobot kerja. Seskoad dalam rangka mengembangkan sistem olah yudha bagi para pasis Seskoad memerlukan biaya, sarana yang lebih modern karena ingin memberikan pengalaman kepada perwira-perwira yang sedang menempuh Dikreg bagaimana Pasis bisa bertindak sebagai Komandan Staf, baik dalam merencanakan latihan operasi tingkat Brigade, Korem, Kodam, Divisi maupun gabungan.

Seskoad membutuhkan sarana pusat olah Yudha, nantinya tidak hanya untuk digunakan oleh siswa tetapi bisa digunakan oleh satuan-satuan di Pusat Kesenjataan, Kostrad, Kopassus maupun satuan di Kodam. Seskoad tidak hanya menjadi *Center of Excellent* dalam pendidikan, tetapi juga dalam pelatihan, dan ini terbuka bagi lembaga Seskoad untuk mengembangkan sumber daya manusia tidak saja menggunakan atau melalui pendidikan tetapi latihan khusus maupun latihan yang lainnya.

Pengembangan Angkatan Darat itu juga tidak terlepas dari fungsi Litbang, hampir semua jajaran di TNI AD mempunyai fungsi Litbang. Litbang itu menjadi satu kekuatan karena Litbang itu tidak lepas dari perencanaan serta akhirnya akan digunakan sebagai saran masukan kepada pimpinan Angkatan Darat dalam bentuk *blueprint*.



Brigjen TNI Fulad, S.Sos, M.Si. Merupakan Abituren Akmil 1990 dan lulusan Dikreg Seskoad tahun 2004, dan Lemhannas RI tahun 2016. saat ini menjabat sebgai Wadan Seskoad.



LETKOL INF RIVAN R. RIVAI

Pemahaman tentang Australia's Defence Strategic Update 2020

Di pertengahan tahun 2020, tepatnya tanggal 1 Juli 2020. Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, mengumumkan secara langsung penerbitan dokumen Australia's Defence Strategic Update (DSU) 2020 di auditorium Australian Defence Force Academy (ADFA). DSU 2020 merupakan dokumen di level kebijakan yang bertujuan untuk memperbaharui isi kebijakan Buku Putih Pertahanan Australia 2016. Pembaharuan ini dilakukan karena kebijakan yang terdapat di dalam Buku Putih Pertahanan 2016 dinilai sudah tidak lagi dapat mengikuti cepatnya perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Sehingga pemerintahan Scott Morrison tidak hanya merasa perlu untuk memperbaharui kebijakan pertahanan Australia namun juga melaksanakan perubahan mendasar dalam pengaplikasian sistem pertahanan Australia beralih secara bertahap dari konsep aliansi menuju konsep pertahanan secara mandiri. Signifikansi penerbitan DSU 2020 juga diindikasikan dengan pernyataan yang disampaikan PM Scott Morrison tentang peran dokumen tersebut untuk memandu Australia melewati salah satu masa paling menantang semenjak mereka menghadapi existential threat (ancaman nyata) di era 1930 dan 1940 saat jatuhnya ketertiban global dan regional akibat Perang Dunia.

Sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Australia, besar kemungkinan Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan – kebijakan yang ada di dalam DSU 2020. Sehingga esai ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang bentuk dan arah kebijakan

Pertahanan didalam DSU 2020. Hal lainnya yang akan dibahas secara singkat adalah wujud kekhawatiran Australia yang tingkat ancamannya disandingkan oleh pengambil kebijakan Australia dengan era Perang Dunia. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi pemikiran awal tentang abidang pertahanan Indonesia, maupun hubungan bilateral Indonesia dan Australia. kebijakan strategis bidang pertahanan Indonesia.

Pembahasan.

DSU mengidentifikasi beberapa pendorong utama yang dijadikan alasan untuk memperbaharui kebijakan pertahanan Australia secara signifikan. Pendorong tersebut adalah;

Pertama, persaingan strategis antara dua negara adikuasa, Amerika dan China. Terdapat kekhawatiran bahwa persaingan dua negara super power tersebut dapat menjadi "kesalahan perhitungan yang paling mungkin mengarah ke konflik militer langsung" bagi Amerika dan sekutunya.

Kedua, kegiatan di zona abu-abu. Kegiatan ini ditandai dengan adanya perilaku negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang semakin assertive dalam mencapai tujuan strategis, dengan menggunakan coercive activity dibawah ambang norma pengerahan pasukan secara konvensional.

Ketiga, terancamnya norma, aturan dan institusi internasional yang selama ini telah melindungi negara-negara kecil dan berkembang dalam melakukan hubungan internasional secara aman dan nyaman.

Keempat, percepatan modernisasi Alutsista di kawasan yang disertai dengan adanya pengembangan dan kemunculan disruptive technology, seperti kemampuan cyber.

Kelima, meningkatnya kebutuhan untuk memprioritaskan aset militer guna melindungi keamanan individu (human security) yang disebabkan oleh timbulnya pandemi Covid 19 maupun bencana alam yang semakin mengancam keselamatan dan keamanan manusia dengan tingginya kerugian secara materiil maupun banyaknya jumlah korban.

Menanggapi situasi di atas yang dianggap memiliki potensi untuk membahayakan kepentingan maupun keberadaan Australia sebagai negara, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Australia yang dituangkan ke dalam DSU adalah sebagai berikut:

Pertama, mengutamakan kawasan paling dekat sebagai fokus geografi Angkatan Bersenjata Australia (ADF). Kawasan ini meliputi mulai dari timur laut Samudera Hindia hingga perairan maritim dan kawasan Asia Tenggara, Papua Nugini dan barat daya Pasifik.

Kedua, memperkuat kemandirian ADF dan kemampuan Alutsista untuk melaksanakan tindakan pencegahan operasional;

Ketiga, meningkatkan kemampuan Pertahanan Australia dalam menanggapi kegiatan di zona abu-abu.

Keempat, meningkatkan kemampuan ADF dalam operasi intensitas tinggi serta mempertahankan kemampuan ADF untuk mengerahkan pasukan secara global baik secara mandiri maupun dalam aliansi dengan Amerika.

Kelima, meningkatkan kapasitas pertahanan untuk mendukung instansi sipil dalam penanggulangan bencana alam dan krisis.

Agar kebijakan yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya dapat dilaksanakan secara terarah, pemerintah Australia di dalam DSU menetapkan tiga tujuan strategis sebagai panduan perencanaan pertahanan, termasuk susunan kekuatan, pembaruan kekuatan, kerja sama internasional dan operasi militer,

sebagai berikut: Membentuk lingkungan strategis; Menangkal ancaman terhadap kepentingan Australia; dan Menanggapi ancaman dengan kekuatan militer yang tepat, jika dibutuhkan.

Untuk mencapai tiga tujuan strategis yang dikonsepsikan pada DSU, Australia menyiapkan anggaran sebesar 575 milyar dollar Australia atau kurang lebih 5.750 triliun rupiah. Jumlah angka yang relatif cukup besar dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun Pasifik tersebut, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan di lima domain: Informasi dan Siber, Darat, Laut, Udara, dan Angkasa, serta pengembangan kemampuan pendukung guna membentuk entitas pertahanan yang efektif dan efisien.

Peningkatan dan pembangunan kemampuan di lima domain serta kemampuan pendukung lainnya, akan diwujudkan dalam satu dekade dengan prioritas:

Pertama, membentuk kemampuan meningkatkan postur dan kemitraan Pertahanan Australia di kawasan, termasuk dalam mendukung tujuan Pasifik Step-Up;

Kedua, mengembangkan kemampuan yang lebih kuat untuk mempengaruhi lawan dan melindungi sarana prasarana strategis Australia, termasuk rudal jarak jauh, kemampuan siber dan sistem persenjataan penolakan wilayah (area denial);

Ketiga, mengembangkan pengaturan jalur distribusi logistik yang lebih tangguh dan meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dalam rangka meningkatkan kemandirian ADF dalam beroperasi;

Keempat, kemampuan untuk menghadapi kegiatan di zona abu-abu, termasuk, peningkatan kewaspadaan situasional, perang elektronika dan operasi informasi; dan

Kelima, pengembangan perencanaan secara terperinci dalam rangka pembelian Alutsista, fasilitas, sarana prasarana, logistik untuk meningkatkan peran ADF membantu instansi sipil dalam rangka mendukung penanggulangan bencana alam dan krisis.

Jika dianalisa lebih lanjut pokok-pokok

kebijakan pertahanan Australia sesuai prioritas peningkatan dan pembentukan kemampuan di paragraf sebelumnya terlihat bahwa konsep pertahanan Australia berdasarkan DSU lebih mengarah kepada pendekatan konsep pertahanan dengan paradigma Geografis. Hal ini diindikasikan dengan kebijakan Australia untuk meningkatkan dan membentuk kemampuan pertahanan untuk menangkal musuh jauh sebelum mencapai daratan Australia, membentuk wilayah pertahanan dengan fokus peningkatan kemitraan dengan negara-negara sahabat di kawasan serta keinginan untuk mampu menyelenggarakan aktifitas pertahanan secara mandiri. Beralih dari kecenderungan Australia untuk melaksanakan kegiatan pertahanan sesuai pendekatan konsep pertahanan dengan berparadigma Historis dan menjalin aliansi. Perubahan arah kebijakan ini tentunya perlu mendapat perhatian lebih oleh pengambil keputusan bidang pertahanan Indonesia.

Dalam paradigma Geografis, prioritas perencanaan pertahanan, gelar kekuatan serta pelaksanaan pertahanan di level pertahanan strategis utamanya dipengaruhi oleh kebutuhan, keadaan serta kepentingan yang didasari pertimbangan geografis; baik dilihat dari kontur dan bentuk wilayah yang dipertahankan maupun kedudukan, jarak serta posisi daerah pertahanan dihadapkan dengan ancaman maupun potensi pertahanan. Pengaruh paradigma geografis dalam konsep pertahanan dapat dilihat secara nyata dalam penerapan gelar kekuatan pertahanan di Indonesia. Dimana kekuatan pertahanan digelar secara efektif untuk memudahkan pengerahan pasukan dalam menghadapi kemungkinan agresi militer di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun melindungi objek vital yang keamanannya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pertahanan nasional.

Penerapan konsep pertahanan yang diprioritaskan pada gelar kekuatan dengan paradigma Geografis merupakan hal yang logis bagi Sebagian besar pengambil kebijakan

pertahanan di Indonesia namun tidak demikian dengan praktisi maupun pemikir pertahanan di Australia. Penerapan konsep pertahanan dengan paradigma Historis memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan pertahanan Australia. Dalam konsep pertahanan dengan paradigma Historis prioritas pengambilan kebijakan terpusat kepada memberikan dukungan dan memperoleh dukungan dalam aliansi pertahanan dari negara besar yang memiliki keterkaitan historis dengan Australia. Dengan kata lain memprioritaskan hubungan aliansi Australia dengan Great and Powerful Friends; Inggris di era Imperial Defence 1918-1942 dan Amerika di periode 1942-1975 serta periode 1991-2016.

Dalam perjalanannya hanya pada era 1975-1990, Australia memfokuskan pembangunan pertahanan dan gelar kekuatan dengan prioritas paradigma pertahanan Geografis. Berpalingnya prioritas pertahanan Australia dari mempertahankan aliansi ke mempertahankan Australia secara geografis pada era 1975-1990 disebabkan oleh salah satunya adalah kegagalan negara-negara barat di Perang Vietnam dan tekanan domestik dari dalam negeri.

Prioritas penerapan konsep pertahanan berdasarkan faktor geografis di era 1975-1990 juga diperkuat oleh Dobb's Review ditahun 1986 yang menyarankan pembangunan kemampuan pertahanan Australia didasari pemikiran adanya kemungkinan ancaman yang bisa saja diluncurkan ke Australia melalui wilayah kepulauan Asia Tenggara sebagaimana yang dilaksanakan Jepang di Perang Pasifik.

Walaupun Dobb juga mengakui bahwa posisi Australia sebagai suatu benua tersendiri terpisah dari negara-negara terdekat merupakan kekuatan di bidang pertahanan; dengan alasan utama adanya celah wilayah laut dan udara dengan daratan terdekat di Utara Australia yang akan mengakibatkan permasalahan pengerahan sumber daya bagi pasukan yang berencana mengancam langsung Australia; adanya celah tersebut juga diprediksi memberikan keunggulan waktu bagi

Australia untuk menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan operasi militer.

Berjalannya waktu akhirnya Australia kembali mengambil kebijakan pertahanan dengan paradigma Historis, memprioritaskan kebijakan pertahanan untuk menjalin aliansi dengan Amerika berdasarkan beberapa faktor yang utamanya adalah tidak adanya ancaman nyata bagi Australia setelah kemenangan dunia barat di Perang Dingin. Sehingga kembali ke pertanyaan awal di pendahuluan tentang wujud kekhawatiran pemerintahan Scott Morrison yang dianggap sebanding dengan era Perang Dunia, sehingga menuntut Australia kembali memprioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan dengan pertimbangan faktor geografis.

Beberapa analisis yang menyoroiti bentuk kekhawatiran yang menyebabkan Australia menerbitkan dokumen tersebut mengarah ke aktivitas yang dilakukan China di beberapa tahun terakhir. Peter Layton analis dari Griffith Asia Institute serta Zack Cooper dan Charles Edel dari United States Studies Center yang berada di Universitas Sydney serta banyak lagi analis lainnya yang berpendapat kekhawatiran tersebut timbul dari perkembangan dan perilaku China saat ini. Walaupun tidak disampaikan secara eksplisit, namun anggapan bahwa China adalah negara yang dimaksud di dalam DSU sebagai kekhawatiran bagi keamanan Australia diperkuat oleh beberapa pernyataan di DSU mengenai perkembangan lingkungan strategis yang dijadikan delapan pendorong utama perubahan kebijakan pertahanan Australia. Terutama di pernyataan tentang negara adikuasa yang semakin asertive dalam mencapai tujuan; secara jelas DSU menyebutkan tentang pembangunan basis militer China sebagai bentuk kegiatan yang dapat merusak stabilitas keamanan di Indo-Pasifik dan berimplikasi negatif terhadap kepentingan Australia. Aktifitas di zona abu-abu yang disebut DSU membahayakan kepentingan nasional Australia seperti serangan cyber yang ditenggarai oleh negara sebagai salah satu aktor utama, influence operation yang tidak menghormati dan

cenderung membahayakan sistem demokrasi Australia, seringkali dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh China di tahun-tahun terakhir.

Namun, bila dianalisis lebih lanjut, tulisan ini berpendapat bahwa, kekhawatiran yang ditimbulkan China akhir-akhir ini belum sebanding dengan situasi di era Perang Dunia dimana terdapat negara yang menimbulkan ancaman nyata bagi keamanan nasional maupun internasional.

Melalui kacamata tradisional keamanan internasional, dimana keamanan suatu negara diukur berdasarkan parameter ancaman militer dan the use of force, belum terlihat bahwa China memenuhi seluruh elemen segitiga ancaman (kemampuan, kesempatan, dan niat).

Dari segi kemampuan, saat ini hanya kemampuan nuklir China yang memiliki potensi untuk secara langsung mengancam Australia maupun Indonesia. Namun, sejak tahun 1964 awal China memiliki kemampuan tersebut, mereka dengan sangat ketat mengaplikasikan prinsip self defensive strategy penggunaan senjata nuklir. Prinsip ini melarang penggunaan senjata nuklir sebagai alat serang; prinsip ini juga membatasi penggunaan senjata nuklir untuk bertahan dengan pre emptive strike. Hal ini tentunya didasari oleh deterrent effect (daya tangkal) yang disebabkan oleh belum sebandingnya kemampuan nuklir China dengan kemampuan Amerika dan sekutunya. Kemampuan blue water Navy China saat ini juga masih dalam tahap berkembang dan belum memiliki kemampuan ekspedisi yang bisa mengancam secara langsung Australia maupun Indonesia. Terlebih dengan adanya choke points di rangkaian kepulauan antara Taiwan dan Filipina, wilayah perairan antara Filipina dan Indonesia serta Selat Malaka.

Dengan terbatasnya kemampuan ekspedisi tentunya Angkatan Bersenjata China (PLA) memiliki hambatan untuk mengerahkan kekuatan darat maupun kekuatan udaranya. Sehingga semakin kecil kesempatan yang dimiliki China untuk mengancam secara langsung. Militerisasi rangkaian kepulauan

Spratlys yang awalnya diduga dijadikan basis militer guna menciptakan kesempatan untuk pengerahan pasukan, saat ini terlihat lebih difungsikan sebagai alat pengaplikasian strategi bertahan asimetris Anti Air and Area Denial (A2AD) China yang dinilai efektif untuk menangkal masuknya kekuatan militer Amerika dan sekutunya. Belum terlihat pembangunan maupun penggunaan rangkaian kepulauan tersebut untuk memberikan kesempatan staging points (batu loncatan) untuk mengancam langsung Australia. Namun, tentunya dengan pesatnya peningkatan dan pembangunan kekuatan militer China, akan sulit diprediksi kapan mereka dapat memiliki kemampuan ekspedisi yang menghasilkan kesempatan untuk mengancam secara langsung Australia maupun Indonesia.

Analisis niat dalam konteks ancaman keamanan nasional maupun internasional merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan. Dalam bukunya *Perception and Misperception in International Politics*, Robert Jervis menyampaikan dengan gamblang beberapa contoh pengambilan keputusan yang berakibat fatal karena salahnya penafsiran tentang persepsi niat yang dikaitkan dengan ancaman, serta sulitnya menganalisis niat yang disebabkan oleh adanya bias baik secara individual maupun institusional. Sejauh ini secara eksplisit belum terlihat penunjukan niat China untuk mengerahkan kekuatan militer secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam keamanan Australia. Tulisan ini berpendapat kegiatan yang dilakukan oleh China yang dianggap sebagai aktivitas di zona abu-abu oleh Australia merupakan bentuk kompetisi politik internasional yang belum memiliki elemen ancaman bagi keamanan nasional. Namun, tentunya dari kacamata militer yang memiliki prinsip *si vis pacem, para bellum* merupakan kewajaran jika DSU beranggapan bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari niat China pada skenario kemungkinan terburuk.

Penutup.

Terlepas dari logika strategis pengambilan kebijakan untuk menerbitkan DSU dan perubahan konsep pertahanan Australia dari paradigma historis aliansi ke paradigma geografis, saat ini Indonesia dan Australia berada pada suatu momen yang menentukan.

Fokus kebijakan pertahanan Australia yang sedang memprioritaskan pembangunan kemampuan pertahanan serta kerja sama untuk membentuk wilayah pertahanan dengan fokus regional berdasarkan tiga tujuan strategis (Shape, Deter, Respond) yang terdapat di *Defence Strategic Update 2020* membuka peluang kerja sama pertahanan yang lebih besar bagi Indonesia dan Australia. Terlebih jika benar analisis skenario terburuk perkembangan lingkungan strategis Australia penerbitan DSU yang dijadikan pedoman peningkatan dan pembangunan kemampuan pertahanan satu dekade ke depan. Kondisi geografis Indonesia dilihat dari segi letak dan adanya Choke Points di alur laut kepulauan Indonesia, merupakan hambatan strategis alami bagi pertahanan Australia bila ada pergerakan dari arah Utara. Bagi Indonesia kepastian keamanan dari arah Selatan maupun akses teknologi dan informasi yang dimiliki Australia merupakan potensi kekuatan jika skenario terburuk tersebut terjadi.

Namun, di lain sisi tentunya, kebijakan Australia yang tercantum di dalam DSU juga dapat menjadi sumber security dilemma mendorong timbulnya kompetisi pembangunan kemampuan Alutsista antara Indonesia dan Australia maupun negara-negara lainnya di Kawasan Asia Tenggara maupun timbulnya ketidakpercayaan strategis; bila terjadi salah komunikasi dan pemahaman tentang arah kebijakan dan logika strategis penerbitan DSU oleh Australia.

Letkol Inf Rivan R. Rivai adalah abituren Akmil 2001 dan lulusan New Zealand Advance Command and Staff Course/ACSC (Sesko New Zealand) 2017 saat ini menjabat sebagai Kabagminjianbang Sdirjianbang Seskoad.



KOLONEL INF TOGU PARDONANGAN

PERAN TNI AD DALAM MENINGKATKAN NASIONALISME MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, permasalahan perbatasan antar negara baik di darat maupun di laut sangat kompleks. Berbagai permasalahan seperti: delineasi, demarkasi, limitasi, kejahatan lintas batas dan aspek sosial-ekonomi-budaya-pertahanan dan keamanan menggambarkan sedemikian luas ruang lingkupnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sehingga penanganan perbatasan antar negara memerlukan dukungan dari berbagai sektor pembangunan di pusat dan daerah. Pembangunan perbatasan sesungguhnya adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, serta dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya berada di tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah darat berbatasan dengan 3 (tiga) negara yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; di laut berbatasan dengan 4 (empat) negara yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Selanjutnya, wilayah yurisdiksi Indonesia di laut berbatasan dengan 9 (sembilan) negara yakni Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste.¹

Secara umum kondisi wilayah perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut, berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.

Dalam konteks perbatasan RI-Malaysia, misalnya, kondisi objektif sosial ekonomi masyarakat di kawasan Malaysia ternyata relatif lebih baik daripada yang dialami masyarakat perbatasan di sisi Indonesia. Sedangkan dalam konteks perbatasan RI-PNG dan RI-Timor Leste, kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan di sisi Indonesia bisa dikatakan relatif sama atau sedikit lebih baik dibandingkan kondisi di wilayah perbatasan Papua Nugini atau Timor Leste.

Wilayah perbatasan antar negara di darat pada sisi Indonesia meliputi 4 (empat) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, Papua, dan mencakup 16 kabupaten/kota. Sementara itu, wilayah perbatasan laut mencakup 11 Provinsi dan 25 kabupaten/kota. Wilayah perbatasan juga mencakup 92 pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal garis batas wilayah NKRI sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2005.

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menyatakan bahwa pengembangan kawasan perbatasan sebagai pinggiran negara diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman, melalui pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Menjaga keutuhan wilayah NKRI khususnya di perbatasan, merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Pertahanan Negara. Kemauan warga

negara untuk bela negara tergantung oleh rasa nasionalisme warga negara terhadap negaranya. Namun demikian, kenyataan di lapangan dirasakan bahwa nasionalisme warga negara, khususnya di perbatasan, semakin menurun. Hal ini disebabkan karena kekurangpekaan terhadap berbagai kondisi kesejahteraan di wilayah perbatasan yang menjurus pada munculnya ancaman yang dapat membahayakan stabilitas dan keutuhan NKRI.

Dari uraian tersebut di atas, penulis dapat **mengidentifikasi berbagai persoalan** yang terjadi diantaranya, pertama kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih. Kedua, belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Ketiga, belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan.

Dengan demikian, dari berbagai persoalan tersebut, dapat **dirumuskan permasalahan** yang ada yaitu, “Bagaimana peran TNI AD dalam mengamankan NKRI melalui peningkatan nasionalisme warga di wilayah perbatasan darat?”

Pembahasan.

Peran TNI AD dalam mengamankan wilayah perbatasan darat melalui peningkatan nasionalisme warga perbatasan, penulis akan membahas tentang berbagai persoalan yang dihadapi meliputi tiga hal utama, yakni belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di kawasan perbatasan, kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan, dan belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan. Persoalan tersebut masing-masing akan dibahas ditinjau dari data dan fakta yang ada, keinginan dan harapan penulis, analisis penulis, kendala dan kelemahan yang dihadapi serta upaya mengatasi.

Pertama, belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Keterbelakangan pembangunan (underdevelopment) khususnya di daerah perbatasan antara negara mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini yakni belum terdukungnya :

a. Pendidikan mesti berorientasi keluar (*outward looking*), yakni untuk menumbuhkembangkan sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang baik di masyarakat sehingga, proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (*driving forces*) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah perbatasan negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan masih sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar. Pendidikan di kawasan perbatasan hanya mampu menyediakan fasilitas yang jauh dari kata cukup, dengan kata lain bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih sangat minim. Bahkan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga misalnya Malaysia tidak memiliki bangunan sekolah menengah atas, sehingga anak-anak yang berasal dari wilayah ini ada yang bersekolah

di negara tetangga. Berbagai kondisi pendidikan yang ada di sekitar kawasan perbatasan kemudian diperparah dengan aksesibilitas menuju ke sekolah yang buruk, sehingga menghambat guru maupun siswa. Mereka harus menyeberangi sungai, melewati hutan-hutan, bahkan pada beberapa wilayah tidak memiliki akses jalan darat untuk menempuh perjalanan menuju ke sekolah. Butuh waktu lama dan tenaga ekstra karena harus melewati medan yang sulit dan jauh. Selain itu, tenaga pengajar juga terbatas karena tidak banyak yang mau mengabdikan diri sebagai guru di daerah perbatasan yang terpencil dengan akses yang sulit serta gaji yang kurang memadai. Potret buram pendidikan di kawasan perbatasan bukanlah hal yang baru. Pada sebagian besar kawasan perbatasan negara merupakan wilayah tertinggal, sungguhpun peran wilayah perbatasan dalam konsep kedaulatan negara sangat penting. Beranda terdepan negara seolah-olah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa dan sekaligus gudang keterbelakangan dalam pembangunan nasional. Ketimpangan pendidikan dengan negara tetangga merupakan faktor utama penyebab anak-anak usia sekolah lebih memilih untuk menimba ilmu di negara tetangga tersebut. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga guru yang berkualitas, biaya pendidikan yang gratis, banyak sekolah yang di lengkapi dengan asrama, termasuk seragam dan buku-buku penunjang sampai jaminan kerja bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi. Hal ini menjadi magnet bagi mereka yang berharap untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan layak. Alasannya sangat relevan dan logis, tidak lain karena sekolah di negara tetangga tidak dipungut biaya sampai tamat, sedangkan sekolah di Indonesia masih dipungut biaya terlebih untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah.

b. Sarana dan prasarana kesehatan. Pentingnya kebutuhan dasar

berupa kesehatan bagi warga di wilayah perbatasan dilakukan agar kesehatan masyarakat lebih baik sehingga akan menciptakan kualitas masyarakat yang higienis yang tentunya akan berdampak pada kehidupan sosial yang semakin terjamin, dengan dibangunnya polindes-polindes di desa-desa terpencil dimaksudkan agar jarak tempuh masyarakat dengan pelayanan kesehatan lebih dekat. Pembangunan daerah perbatasan juga melihat faktor manusianya. Jumlah penduduk juga mempengaruhi dibangunnya daerah-daerah perbatasan. Di desa-desa jumlah kelahiran lebih besar dibandingkan dengan jumlah kematian, dengan terpenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat akan dipermudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa di wilayah perbatasan. Kondisi pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan masih minim. Daerah-daerah perbatasan masih belum memiliki rumah sakit swasta maupun rumah sakit daerah dan fasilitas kesehatan khusus lainnya. Fasilitas kesehatan di perbatasan sebagian besar dilayani oleh Puskesmas yang berada di ibukota kecamatan. Rumah Sakit Umum Daerah hanya terdapat di Ibukota Kabupaten. Terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk Reformasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menghilangkan kesenjangan pembangunan kesehatan antar daerah, antar sosial ekonomi, serta meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu yang saat ini dianggap masih kurang maksimal pelayanan maupun fasilitas kesehatannya, sehingga penduduk perbatasan cenderung lebih memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari negara tetangga yang relatif dekat dan mudah dicapai .

Kedua, kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan. Akses

pelayanan infrastruktur pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang tidak merata dengan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air minum, disertai sistem transportasi untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki keterkaitan fungsi yang merupakan penunjang dari aktivitas penduduk perbatasan. Kondisi transportasi antar wilayah di perbatasan masih belum mampu menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat, dan ini disebabkan oleh minimnya prasarana transportasi darat. Sarana transportasi darat, baik jalan, jembatan maupun kendaraan relatif sedikit. Tingkat ketersediaan dan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, serta fasilitas lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan pasar. Hal ini membuat penduduk di daerah perbatasan masih cenderung untuk berorientasi ke negara tetangga yang tingkat aksesibilitas infrastruktur fisik dan informasinya relatif lebih tinggi. Demikian pula dengan jaringan jalan darat di kawasan perbatasan yang masih kurang, membuat masyarakat lebih sering bepergian dan berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga. Di sisi lain pelayanan listrik sangat minim, demikian juga sarana perhubungan khususnya telekomunikasi di kawasan perbatasan masih sangat terbatas. Sebaliknya, kawasan perbatasan negara tetangga sudah memiliki sarana telekomunikasi yang sangat baik, sehingga daerah yang sudah terdapat sarana telekomunikasi biasanya kemampuannya masih di bawah sinyal operator negara tetangga, hal ini menunjukkan besarnya perbedaan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara tetangga yang hampir seluruhnya telah mendapat layanan infrastruktur. Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya investasi ke kawasan perbatasan. Akibatnya kawasan ini menjadi daerah yang tertinggal, dan sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Kawasan perbatasan memiliki aksesibilitas

yang tinggi terhadap wilayah perbatasan terhadap kota-kotanya. Jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara akan segera menjadi pertaruhan. Selama ini pemerintah dan masyarakat luas baru tersentak oleh seriusnya masalah perbatasan ketika ada ramai-ramai tentang hilangnya beberapa wilayah Indonesia karena kalah di pengadilan internasional, atau karena adanya klaim sepihak terhadap wilayah kita dari negara tetangga. Selain itu, karena buruknya infrastruktur di daerah perbatasan, banyak penduduk di kawasan ini lebih memiliki kedekatan emosional dan interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga. Tidak jarang mereka ini mengalami krisis identitas kebangsaan berhubung rendahnya perhatian negara kita terhadap nasib mereka dan perkembangan daerahnya². Dihadapkan dengan infrastruktur negara tetangga yang lengkap dan modern dan jaraknya yang lebih dekat membuat penduduk lebih cenderung melakukan aktivitas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana infrastruktur negara tetangga. hal tersebut sangat rawan terhadap rasa nasionalisme terhadap NKRI yang mulai tergerus dan dapat dimanfaatkan negara tetangga untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Ketiga, belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kondisi masyarakat di kawasan perbatasan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan minimnya fasilitas dan lapangan kerja di sana membuat masyarakat di garis-garis terdepan wilayah NKRI lebih memilih bekerja dan menggantungkan hidup di negeri tetangga menjadi pekerja kasar membuat warga sulit berkembang. Perekonomian kawasan perbatasan masih tertinggal dari daerah lainnya, kondisi di lapangan memperlihatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan RI sangat memprihatinkan. Secara umum kondisi wilayah perbatasan sangat berbeda, wilayah negara tetangga relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah Indonesia.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menyebabkan produk-produk yang dihasilkan oleh penduduk di kawasan perbatasan tidak dapat bersaing. Terdapat kecenderungan perubahan orientasi kegiatan sosial ekonomi penduduk di wilayah Indonesia. Sehingga kegiatan perdagangan masih bergantung pada pasokan negara tetangga, karena jika menunggu pasokan dari pusat, harga kebutuhan pokok lebih tinggi jika dibandingkan dari negara tetangga. Saat ini, fakta di lapangan, bahan makanan pokok kurang mendapatkan suplai dari Pulau Jawa, karena jarak tempuh dan infrastruktur yang belum memadai di satu sisi, peredaran komoditas yang sebagian banyak ilegal itu harus ditertibkan.

Dari uraian di atas kerawanan yang dapat ditimbulkan dari persoalan yang mendasar tersebut akan melunturkan jiwa nasionalisme WNI di wilayah perbatasan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak negara tetangga untuk merekrut penduduk wilayah perbatasan guna kepentingannya dalam mengeksploitasi SDA Indonesia dan strategi besar lagi adalah menguasai dan mengklaim sebagian besar wilayah perbatasan sebagai wilayah kedaulatannya.

Adapun kendala yang dihadapi di wilayah perbatasan antara lain: Pertama, kurangnya inisiatif pemerintah daerah setempat dalam menghidupkan roda perekonomian di perbatasan. Pemerintah setempat hanya menjalankan rutinitas pelayanan saja, dan belum membuat program terobosan baru untuk memaksimalkan lapangan kerja. Kedua, Anggaran pembangunan daerah banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan. Pemerintah pusat telah memiliki program pembangunan dari berbagai segi Ipoleksosbudhankam di seluruh wilayah perbatasan Indonesia namun program tersebut sering terhambat dan tidak berjalan karena penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab pejabat Pemda yaitu memanfaatkan dana program pembangunan untuk kepentingan pribadi sehingga permasalahan kesenjangan wilayah perbatasan tidak terselesaikan. Ketiga, Sarana

dan Prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya Satgas pengamanan dan satuan teritorial di wilayah perbatasan memiliki, sarana dan prasarana terbatas belum dapat menjangkau semua wilayah sehingga harus berkoordinasi dengan Pemda dan Kementerian serta Lembaga terkait guna mempermudah dalam upaya membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah perbatasan. Keempat sulitnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sebagian daerah, seperti pembangunan jalan yang melintasi tanah adat dimana tanah ulayat/tanah adat tidak boleh digunakan karena sangat disakralkan oleh pemuka/tokoh adat dan masyarakat wilayah perbatasan.

Sedangkan peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan antara lain: Pertama, kesadaran nasionalisme masih ada dalam kehidupan keseharian penduduk perbatasan, namun tetap dibina secara periodik guna tetap terpeliharanya jiwa nasionalisme tersebut sehingga tidak terpengaruh terhadap kesenjangan yang terjadi. Kedua, pengaruh besar khususnya tokoh adat setempat yang mampu menjaga nilai-nilai budaya lokal sehingga penduduk perbatasan masih memiliki rasa kecintaan terhadap budaya NKRI yang telah memberikan kemerdekaan namun pengaruh tersebut terus dipelihara dan digalang guna menangkal upaya negara tetangga dalam memanfaatkan kesenjangan diperbatasan untuk kepentingannya.

Untuk membantu menangani kesulitan masyarakat wilayah perbatasan agar jiwa nasionalisme tetap terjaga melalui beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Komando Kewilayahan dan Satgas Pamtas antara lain : Pertama, satuan Komando Kewilayahan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait baik kementerian dan lembaga di bidang pendidikan dan kesehatan setempat untuk dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan tenaga kesehatan maupun tenaga guru, sehingga dapat menciptakan tenaga kesehatan dan guru yang sudah teruji dilengkapi dengan sertifikat yang disahkan oleh Kementerian sebagai legalitas hukum, selanjutnya dapat dioperasionalkan guna

membantu sekolah dan pos kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok wilayah perbatasan dan ditunjang dengan dana operasional serta gaji yang berimbang untuk mendukung moril dan semangat pengabdianya selama bertugas. Kedua, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur melalui kerja sama dengan Pemda dan Kementerian serta Lembaga terkait dengan melaksanakan kegiatan TMMD berupa pembangunan gedung-gedung sekolah dan Puskesmas maupun pasar-pasar tradisional yang lebih baik di lokasi yang sulit terjangkau untuk mempermudah penduduk perbatasan mendapatkan pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sandang papan di lingkungannya. Ketiga, memberikan materi kesadaran bela negara di sela-sela pelatihan dan dalam setiap pendidikan sekolah serta pertemuan-pertemuan adat. Dengan demikian, dengan semakin diperhatikannya warga sekitar perbatasan akan membuat semangat kebangsaan warga meningkat yang tentunya akan menentukan terhadap kemauan warga perbatasan untuk turut serta dalam pertahanan negara. Keempat Komando Kewilyahan dan Satgas Opspamtas serta kementerian dan lembaga terkait melaksanakan penggalangan kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman tentang artinya pembangunan sarana jalan bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan serta kecepatan transportasi antar daerah.

Penutup.

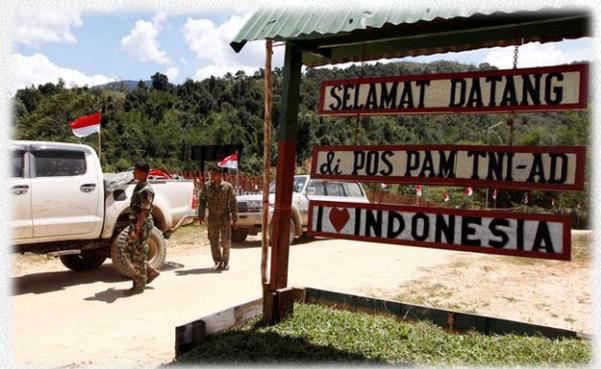
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan sangat rentan dengan terjadinya kesenjangan antara dua negara yang berbatasan, seperti : **Pertama** kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan. **Kedua**, belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. **Ketiga**, belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan. Hal tersebut dapat menurunkan jiwa nasionalisme WNI

Yang berada diperbatasan dan mudah dimanfaatkan oleh pihak negara tetangga untuk merekrut dan mengeksploitasi SDA Indonesia. Sehingga perlu adanya terobosan dalam upaya mencegah luntarnya jiwa nasionalisme WNI di wilayah perbatasan dengan melakukan berbagai langkah dan tindakan untuk mengeliminir dan menghilangkan segala kesenjangan yang ada dengan melakukan tindakan nyata dari pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga yang terkait, bekerjasama dengan TNI maupun dari satuan tugas pengamanan di wilayah perbatasan.



Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia, agar jiwa nasionalisme WNI di wilayah perbatasan tetap terjaga dan semakin mencintai NKRI, dihadapkan kesenjangan kesejahteraan yang nyata di wilayah perbatasan dengan negara tetangga maka disarankan sebagai berikut :

- a. Komando atas berkoordinasi Kementerian PUPR dalam program pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur secara terpadu dengan TNI di wilayah perbatasan.
- b. Komando Atas berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dalam program kepelatihan tenaga kesehatan saat latihan pratusas dan menerjunkan dokter muda untuk wajib bertugas di wilayah perbatasan, serta membangun sarana kesehatan seperti pos kesehatan terpadu yang lokasinya berdampingan dengan pos satgas pengamanan.
- c. Komando Atas berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program pelatihan tenaga pendidikan bagi prajurit TNI saat pratusas dan kepelatihan tenaga pengajar bagi warga secara terpadu di wilayah perbatasan serta mewajibkan tenaga guru muda untuk berdinis di wilayah perbatasan.
- d. Komando Atas berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam memberikan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin secara terpadu.
- e. Komando Atas berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dalam rangka program kepelatihan Belanegara kepada WNI di wilayah perbatasan secara terpadu.



Kol Inf Togu Parmonangan, S.I.P. adalah abituren Akmil 1994 dan lulusan Seskoad tahun 2009 dan Sesko TNI 2017. Saat ini menjabat Kadepops Seskoad



MAYOR CBA I KETUT ARSANA PUTRA, S.T., M.SC

IMPLEMENTASI MANAJEMEN LOGISTIK GUNA MENDUKUNG INTEROPERABILITAS ANTAR KECABANGAN TNI AD

Pendahuluan

Saat ini, TNI AD telah memodernisasi sebagian besar Alutsistanya, sehingga kemampuan manuver yang diimbangi dengan sistem senjata dan sistem Kodal yang modern mampu mempengaruhi jalannya pertempuran, khususnya bagi satuan yang bermanuver. Dengan demikian harus dilakukan langkah strategis terhadap proyeksi pelibatan satuan TNI AD dalam dimensi pertempuran agar mampu melaksanakan tugas pertahanan negara aspek darat secara optimal. Perkembangan teknologi Alutsista berimplikasi pada perlunya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar kecabangan, sehingga menghasilkan model pertempuran yang efektif, efisien, berdayaguna tinggi, berdaya tangkal tinggi, dan berdaya tempur tinggi. Selain itu perlu juga dipahami bahwa operasi yang dilaksanakan oleh TNI AD merupakan bagian dari operasi gabungan yang dilaksanakan oleh TNI, sehingga interoperabilitas tidak hanya dilaksanakan antar kecabangan tetapi juga antar matra.

Pembahasan.

Dalam satu dekade terakhir ini paradigma pertempuran diwarnai dengan teknologi militer yang semakin modern, penggunaan teknologi tinggi dalam pertempuran akan memberi warna tersendiri dengan berbagai kemampuan yang dikembangkan oleh masing-masing negara. Pengembangan teknologi Alutsista saat ini merupakan tuntutan ancaman yang semakin kompleks dengan ciri sebagai berikut :

a. Cepat (rapid). Kecepatan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan

pertempuran. Dengan teknologi tinggi diharapkan akan meningkatkan aspek kecepatan baik untuk menggerakkan pasukan ataupun Alutsista sehingga memberikan keunggulan momentum dalam rangka memenangkan pertempuran,

b. Ketepatan (precision). Teknologi tinggi memungkinkan untuk meningkatkan presisi dalam bertempur. Tiga aspek presisi yang dapat ditingkatkan oleh teknologi tinggi adalah presisi manuver, presisi tembakan, dan presisi informasi. Pertempuran modern akan semakin sering dilakukan di pemukiman yang tentunya akan bersinggungan dengan populasi masyarakat sipil yang merupakan non kombatan berdasarkan Konvensi Jenewa. Dengan presisi manuver dan tembakan serta informasi tersebut maka akan meminimalisir kemungkinan jatuhnya korban masyarakat sipil yang berada dalam daerah pertempuran. Di samping itu melalui presisi, hasil yang dicapai bisa lebih optimal dalam menghancurkan musuh yang dihadapi,

c. Jangkauan Jarak capai senjata. Dengan teknologi tinggi maka kemampuan senjata dapat mencapai jarak yang lebih jauh dari jarak yang pernah dicapai sebelumnya. Meriam Armed saat ini dapat menjangkau jarak puluhan hingga ratusan kilometer seperti Astros maupun beberapa Alutsista lainnya yang dimiliki oleh sejumlah Negara maju. Di samping itu senjata-senjata lain yang digunakan oleh satuan Infanteri maupun Kavaleri TNI AD pun juga memiliki karakteristik serupa yang memberikan

keunggulan dalam melakukan pertempuran di darat,

d. Daya hancur tinggi (Lethal). Tentunya menghancurkan musuh menjadi salah satu faktor penentu kemenangan dalam pertempuran. Oleh karenanya daya hancur yang tinggi sangat dibutuhkan dalam perang masa depan. Daya hancur tinggi dapat dihasilkan berkat kemajuan teknologi yang semakin menjadikan senjata memiliki efek yang mematikan. Dengan daya hancur tinggi akan menjamin dalam bertempur untuk melumpuhkan musuh tanpa memberikan ruang bagi perlawanan kembali yang tentunya berpotensi membahayakan pasukan sendiri.

Namun demikian, perkembangan teknologi Alutsista kecabangan TNI AD yang semakin modern saat ini diharapkan tidak hanya mampu melaksanakan tugas masing-masing kecabangan, tetapi juga dituntut harus mampu bekerja sama dengan kesenjataan lain dalam suatu operasi dengan dukungan logistik yang memadai pula. Interoperabilitas menjadi sangat penting untuk dilakukan agar kerjasama antar kecabangan dapat menghasilkan kemenangan dalam pertempuran. Keselarasan taktik dan teknik bertempur dalam suatu jaringan yang terintegrasi antar kecabangan atau network centric perlu dikembangkan agar kerjasama antar kecabangan dapat diterapkan dalam medan pertempuran yang sebenarnya melalui dukungan logistik yang tepat pula. Guna mewujudkan pertempuran yang saling berhubungan antara satu kecabangan dengan kecabangan yang lain, maka diperlukan sistem pendukung dalam rangka mewujudkan interoperabilitas antar kecabangan dengan mengintegrasikan sistem sensor, sistem kodal, sistem senjata yang baik dan sistem dukungan logistik. Hal ini dilakukan agar menghasilkan efektifitas komando dan pengendalian pertempuran yang baik. Keempat sistem tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga elemen daya tempur dapat dimanfaatkan secara optimal

untuk kepentingan pertempuran.

Satuan Pembekalan Angkutan (Cba) merupakan salah satu kecabangan TNI AD, yang mempunyai peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan (interoperabilitas) sebuah operasi serangan atau tempur yang melibatkan antar kecabangan TNI AD. Dalam mewujudkan perannya tersebut, satuan Bekang mengimplementasikan ke dalam tiga fungsi yaitu pembekalan, pemeliharaan, dan jasa Bekang untuk seluruh satuan militer di jajaran TNI AD. Seperangkat peran digunakan untuk menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, akan tetapi memiliki sejumlah peran yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.. Sehubungan dengan hal tersebut maka, peran satuan Bekang menyelenggarakan proses pembekalan, pemeliharaan, dan jasa, Bekang antara satu aspek dengan aspek lainnya harus saling mendukung dan mempengaruhi misalnya keberadaan organisasi, personil, serta materil (Bekang). Oleh karena itu peran Corps Pembekalan Angkutan tidak bisa dipahami secara terpisah, masing-masing aspek tersebut saling berhubungan, melengkapi dan mempengaruhi.

Manajemen Logistik.

Tidak dapat disangkal bahwa tercapainya tujuan operasi militer tidak bisa dipisahkan dari keberadaan dan peran logistik, baik untuk OMP maupun OMSP. Oleh karena begitu pentingnya peran logistik dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut, maka sering dinyatakan bahwa tujuan organisasi merupakan fungsi personil dan logistik. Keberadaan logistik yang memadai sangat menentukan kelancaran pelaksanaan (interoperabilitas) pertempuran/serangan maupun kegiatan administrasi di dalam setiap organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, peran satuan Bekang sebagai badan yang mengelola logistik sangat menentukan tercapainya tugas pokok satuan dalam OMP dan OMSP yang dilaksanakan oleh TNI AD. Untuk memberikan batasan pengertian

manajemen logistik, kita dapat mendasarkan pada kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan, baik berkaitan dengan kegiatan manajerial atau administratif maupun kegiatan operasional, objek yang dipelajari maupun yang dikaji dan sekaligus objek yang dikelola, tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pengelolaan logistik itu sendiri.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan logistik, kegiatan administratif yang krusial dan strategis dilakukan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sementara kegiatan-kegiatan operasionalnya meliputi kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan. Adapun objek yang dipelajari dan sekaligus objek yang dikelola dalam manajemen logistik adalah logistik itu sendiri, yakni sesuatu yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik, baik yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pokok maupun kegiatan administrasi. Istilah logistik juga biasa disebut dengan beberapa istilah seperti perbekalan, barang, material, peralatan, perlengkapan, dan sarana prasarana. Oleh sebab itu, manajemen logistik pun lazim disebut dengan beberapa istilah seperti manajemen perbekalan, administrasi perbekalan, manajemen barang, administrasi barang, manajemen material, ataupun administrasi material. Sementara tujuan yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan pengelolaan logistik adalah mampu mendukung efektifitas dan efisiensi dalam setiap upaya pencapaian organisasi. Begitu pula tujuan dari kinerja satuan Bekang adalah mampu mendukung fungsi Bekang sehingga tercapai apa yang menjadi tugas operasi OMP maupun OMSP yang dilaksanakan seluruh satuan TNI AD.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, obyek kegiatan ataupun tujuan pengelolaan logistik tersebut, dapat dinyatakan bahwa manajemen logistik merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan logistik guna

mendukung efektifitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut beberapa kegiatan dalam manajemen logistik dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan, merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengelolaan logistik, penggunaan logistik, pengorganisasian, maupun pengendalian logistik,

Kedua, Pengorganisasian, merupakan kegiatan merancang dan merumuskan struktur formal dalam upaya pengelolaan logistik dengan melakukan kegiatan mengelompokkan, mengatur, dan membagi aktivitas/tugas sekaligus wewenang kepada setiap unit kerja/anggota organisasi,

Ketiga, Pengawasan, merupakan setiap upaya untuk menjaga pelaksanaan setiap tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan logistik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik berkaitan dengan pemakaian atau penggunaan logistik, proses maupun hasil pengelolaan logistik,

Keempat, Pengadaan, merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat dengan harga, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,

Kelima, Inventarisasi, merupakan kegiatan untuk menyediakan data atas semua logistik yang dimiliki maupun diurus organisasi, baik sebagai hasil usaha pembuatan sendiri, pembelian, hadiah maupun hibah,

Keenam, Penyimpanan, merupakan usaha kegiatan pengurusan logistik, baik yang bersifat administrasi maupun operasional berkaitan dengan perumusan maupun pelaksanaan tata kerja, tata ruang, tata usaha, maupun pengaturan barang ditempat penyimpanan/gudang,

Ketujuh, Pendistribusian, merupakan kegiatan pengelolaan logistik berkaitan dengan pembagian dan penyampaian logistik kepada satuan/unit organisasi yang membutuhkan sesuai dengan sistem kerja

yang telah ditetapkan,

Kedelapan, Pemeliharaan, merupakan kegiatan pengelolaan logistik berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik serta menjamin jangka waktu pemakaian barang mencapai batas waktu yang optimal.

Secara umum kegiatan pengelolaan logistik dimaksudkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sementara secara khusus maksud dan tujuan pengelolaan logistik senantiasa melekat pada setiap pengelolaan logistik itu sendiri. Maksud dan tujuan manajemen logistik tersebut harus senantiasa menjadi pedoman setiap kegiatan pengelolaan logistik. Dikaitkan dengan peran satuan Bekang TNI AD dalam menjalankan fungsi pembekalan angkutan maka maksud dan tujuan tersebut dapat dijadikan alat ukur untuk menilai keberhasilan pengelolaan logistik beserta pendistribusian kepada seluruh satuan dilingkungan TNI AD.

Peran Dukungan Logistik

Peran satuan Bekang TNI AD adalah menyelenggarakan dan melaksanakan pembekalan angkutan dilingkungan TNI AD. Penggunaan istilah peran dukungan logistik tidak hanya digunakan dalam bidang militer saja. Biasanya dukungan logistik identik dengan bidang militer. Peran dukungan logistik bertujuan untuk menjadikan satuan memiliki kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Kekuatan memberi makna pada kuantitas dan kemampuan menekankan pada kualitas. Pembinaan dan peningkatan kekuatan serta kemampuan merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam meningkatkan kesiapan TNI AD dalam melaksanakan tugas pokok seperti pembinaan pembekalan angkutan. Kemampuan dapat diartikan sebagai kesanggupan melakukan, sedangkan kinerja adalah kemampuan bekerja. Penyelenggaraan peran satuan Bekang adalah kesanggupan melakukan penyelenggaraan pembekalan, pemeliharaan, dan jasa Bekang terhadap seluruh satuan dilingkungan TNI AD. Salah satu hal penting dalam menilai suatu

keberhasilan kinerja adalah menilai pencapaian tujuan tugas dan sasaran organisasi berdasarkan penilaian seimbang.

Bahwa pengukuran prestasi logistik adalah hal yang cukup kompleks, mengingat banyak faktor dan kendala yang mempengaruhinya. Namun demikian prestasi dukungan logistik dalam organisasi tetap harus diupayakan sebaik mungkin. Demikian pula halnya peran satuan Bekang TNI AD dalam melaksanakan dukungan logistik harus diupayakan sebaik mungkin walaupun dalam pelaksanaannya menemui kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya tersebut. Prestasi logistik dapat diukur dengan 3 variabel, yaitu :

- a. Penyediaan adalah menyangkut kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan material/bahan produksi, menyangkut variabel persediaan, semakin rendah frekwensi pengeluaran untuk persediaan berarti semakin tinggi investasi yang harus disiapkan,
- b. Kemampuan adalah menyangkut jarak waktu antara penerimaan perintah operasi dengan pergeseran logistik yang dibutuhkan. Satuan Bekang tentu saja harus memberikan dukungan pergeseran logistik yang cepat kepada satuan pemakai. Akan tetapi pergeseran yang cepat saja tidak banyak berarti jika tidak dilakukan dengan konsisten,
- c. Mutu adalah menyangkut seberapa jauh sebaiknya tugas logistik secara keseluruhan dilaksanakan, besarnya kerusakan, pemecahan masalah yang timbul. Tidak banyak manfaat suatu pergeseran logistik yang dilakukan dengan cepat dan konsisten, tetapi banyak materil yang rusak atau logistik yang salah sasaran. Jadi mutu ini menyangkut penjagaan terhadap tingkat kesalahan dan pemecahan masalah.

Pelaksanaan peran dukungan logistik tidak akan mendapat hasil maksimal bila tidak didukung oleh sistem transportasi/angkutan yang memadai. Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan dalam hal ini untuk mobilitas pasukan dan

logistik yang harus selalu tersedia. Mobilitas yang tinggi dari seluruh satuan operasi beserta logistiknya melalui lancarnya transportasi/angkutan akan menunjang tercapainya tujuan tugas pokok secara maksimal baik untuk OMP maupun OMSP. Fungsi angkutan demikian pentingnya bagi pertahanan dan keamanan dalam suatu peperangan. Angkutan merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. Dengan memiliki transportasi/angkutan yang andal akan bisa memobilisasi ribuan pasukan dan dukungan logistiknya. Alat transportasi merupakan suatu wahana yang sanggup memobilisasi seluruh sumber daya suatu negara yang diarahkan untuk mendukung logistik dan tujuan strategis militer. Demikian pula bila dikaitkan dengan peran stuan Bekang TNI AD, berhasilnya dukungan logistik terhadap satuan militer di jajaran TNI AD salah satunya ditentukan oleh sarana angkutan yang tersedia secara memadai.

Beberapa teori yang berhubungan dengan logistik militer dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan logistik memberikan kegunaan waktu dan tempat. Kegunaan tersebut merupakan aspek penting dari operasi. Semua bentuk operasi militer baik perang maupun selain perang membutuhkan dukungan logistik. Ciri utama kegiatan logistik adalah tercapainya sistem yang integral dari berbagai dimensi dan tujuan kegiatan terhadap pergeseran logistik serta penyimpanan secara strategis di dalam pengelolaan sebuah satuan. Suatu satuan dalam praktek sehari-hari tidak hanya menitikberatkan pada masalah administrasi manajemen saja, akan tetapi juga mengurus kegiatan pengelolaan dan penyimpanan bekal atau materil, suku cadang materil. Kegiatan pengelolaan dan penyimpanan ini diartikan dengan kegiatan logistik, yang bertujuan untuk dapat dari beraneka ragam macam material dalam jumlah yang tepat pada saat dibutuhkan dalam keadaan siap pakai ke lokasi yang ditunjuk dengan total biaya pergeseran logistik yang terkecil. Jadi dengan kata lain, dapat diungkapkan bahwa kegiatan logistik,

dalam hal ini peran dukungan logistik dari satuan Bekang TNI AD, akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila memenuhi syarat 4 tepat yaitu: tepat jumlah, tepat mutu, tepat biaya maupun tepat waktu. Hal ini tentu perlu kemampuan manajerial untuk dapat mendesaian suatu sistem dalam mengawasi, mengendalikan arus dan penyimpanan materil, suku cadang materil untuk pemeliharaan secara strategis sehingga dapat diperoleh manfaat maksimum bagi satuan yang didukung.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa logistik sangat berhubungan dengan penentuan tujuan dan cara pencapaiannya. Logistik berhubungan dengan penciptaan dan penyelenggaraan dukungan yang berlanjut kepada satuan-satuan yang melaksanakan operasi. Strategi dan taktik adalah cara yang digunakan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan militer yaitu memenangkan peperangan. Untuk maksud tersebut selain strategi dan taktik, satu hal yang dominan dan sangat menunjang tercapainya kemenangan adalah dukungan logistik yang memadai bagi personel maupun peralatan yang digunakan. Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling mempengaruhi.

Taktik dicapai dengan menggunakan persenjataan dan satuan tempur tertentu demi tercapainya tujuan strategi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa strategi dan taktik memberikan pola penyelenggaraan operasi militer, sedangkan logistik menyediakan sarannya. Dengan demikian, strategi dan taktik dapat memberikan suatu skema operasi, sedangkan dukungan logistik sangat berpengaruh kepada keduanya, baik dari aspek strategi maupun taktik. Maka pada setiap kegiatan operasi militer yang dimulai dari perencanaan tidak dapat dipisahkan antara strategi, taktik, dan logistik, sehingga dalam setiap tindakan pengambilan keputusan selalu didasarkan pada ketiga kondisi tersebut. Dalam logistik militer, penyelenggaraan logistik dilaksanakan untuk menjamin daya tahan terutama pasukan yang berada di garis depan agar tetap dalam keadaan siap selama peperangan berlangsung.

Mayor Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc. Abituren Sepa PK 2000 jabatan Kasi Orgas Bagorgas Sdircab Pusbekangad, saat ini sgd mengikuti Dikreg LX Seskoad



MAYOR INF EDI TRI HERI MULYANTO

PARADIGMA BARU KOMUNIKASI SOSIAL TNI AD YANG HUMANIS DAN ADAPTIF TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT

Pendahuluan

“Social change as a variation of the way the life method that has been received, both due to changes in geographical conditions, material culture, population composition, ideology, and due to the existence of diffusion or discovery of new discoveries in the community “.

Sebuah pendapat menarik yang berasal dari John Lewis Gillin dan John Philip Gillin tentang makna perubahan di dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat dunia saat ini. Selama hidupnya, manusia senantiasa mempelajari dan melakukan perubahan-perubahan terhadap kebudayaannya atau kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungannya. Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat, mengingat kebudayaan diciptakan dan diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, baik secara perorangan maupun berkelompok. Dari kenyataan ini, tidak ada satu pun kebudayaan dan perwujudan kebudayaan yang bersifat statis (tidak mengalami perubahan).

Perubahan sosial adalah perkembangan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, termasuk di dalamnya aspek kebudayaan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah laku dalam suatu masyarakat. Menurut Hurlock, perkembangan sosial adalah perubahan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat (sozialized) memerlukan proses – proses yang terpisah dan sangat berbeda

satu sama yang lain, tapi saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu.¹

Terdapat korelasi antara perubahan sosial dengan perkembangan teknologi yang berujung pada revolusi komunikasi serta berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Aktivitas masyarakat tidak terlepas dari teknologi yang digunakan semenjak zaman sebelum Masehi hingga memasuki era milenium digital saat ini. Bila dipandang dari sudut etika berkomunikasi yang terjadi dewasa ini, ada kesalahan dalam melihat perubahan dalam masyarakat, karena relasi kuasa dalam masyarakat saat ini pada dasarnya berakar pada rasionalitas instrumental kekuasaan dimana terdapat dominasi di dalamnya yang digunakan untuk menekan masyarakat agar tunduk dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh para penguasa. Ada tujuan-tujuan yang terselubung dalam pola komunikasi yang instrumental, kekuasaan dalam masyarakat kemudian direproduksi menjadi institusi-institusi besar dalam masyarakat yang melegitimasi segala yang baik buruk, benar salah dalam masyarakat. Konsekuensi yang terjadi terhadap interaksi sosial dalam masyarakat tentunya memunculkan kesadaran palsu, hubungan antara masyarakat menjadi tidak harmonis dan berpotensi memunculkan konflik di dalamnya.

Ada hal yang menarik ketika revolusi komunikasi dalam bingkai perubahan sosial masyarakat Indonesia dikaitkan dengan doktrin dan tradisi militer Indonesia. Pada pemahaman latar belakang

1. Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan-Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* edisi 5 (2011 : 250)

kondisi doktrin dan tradisi inilah pada sisi tertentu menimbulkan perbedaan antara militer dan revolusi komunikasi termasuk di dalamnya media. Suatu ketika berimpitan secara sinergis, tetapi adakalanya diwarnai ketegangan. Fenomena pasang-surut ini terus terjadi sepanjang dinamika perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Secara individual dan institusional militer tidak akan gampang menyampaikan berita secara bebas kepada media. Bahkan dalam beberapa hal yang dianggap sensitif dan rahasia, mereka akan bersikap sangat protektif terhadap media. Hal ini tentu sangat berbeda dari dunia media massa yang sebagai cerminan revolusi komunikasi, selalu mengejar informasi secara cepat, akurat, tepat, kredibel dan bahkan cenderung bersifat santai dan ngepop (*pop culture*). Pada fenomena konteks kekinian, bukan hal mustahil bagi militer Indonesia untuk dapat mengembangkan upaya-upaya dalam memperluas jangkauan dan kedalaman line of communication dengan seluruh komponen bangsa, dalam paradigma baru komunikasi sosial khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok TNI AD.

Beberapa persoalan yang mengemuka terkait adanya revolusi komunikasi sebagai dampak perubahan sosial masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kondisi doktrin dan tradisi Komunikasi Sosial TNI AD antara lain Pertama, bagaimana peran komunikasi dalam militer khususnya institusi TNI AD Kedua, bagaimana revolusi komunikasi dihadapkan dengan doktrin dan tradisi TNI AD, Ketiga bagaimana menciptakan komunikasi sosial TNI AD yang humanis dan adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia.

Dari uraian latar belakang persoalan di atas dapat diambil suatu rumusan permasalahan yaitu **“Bagaimana menciptakan paradigma baru komsos TNI AD yang humanis dan adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia?”**

Pembahasan

Bagaimana peran komunikasi dalam militer khususnya institusi TNI AD Pada saat

Sidang BPUPKI Juni Tahun 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya tentang pertahanan Indonesia yang saat itu belum memiliki konsep. *“...tanah tumpah Indonesia yang kita ingini (harus) menjadi daerah Negara Republik Indonesia yang kita putuskan. Kita ambil seluruh tanah Indonesia menjadi daerah Indonesia dan tidak memberikan sejenkal kekuasaan Republik Indonesia yang kita ingini.”* Pidato Muhammad Yamin tersebut merupakan gagasan penting dalam meletakkan konsep pertahanan negara yang melindungi segenap tumpah darahnya. BPUPKI yang kemudian digantikan oleh PPKI dalam merumuskan proklamasi dan konstitusi negara menyatakan bahwa sistem pertahanan yang dianut Indonesia adalah pertahanan rakyat semesta (Sishanrata). Konsep ini dimuat dalam alenia keempat yakni *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”* serta Pasal 30 ayat (2) UUD1945.

Berkaca dari lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di atas, tentu tidak terlepas juga sejarah TNI termasuk didalamnya TNI AD. Terwujudnya kemandirian TNI Rakyat tidak terlepas dari bagaimana peran dan sistem komunikasi yang telah dibangun. Dengan kata lain, TNI AD selalu hadir dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu momentum peran dan sistem komunikasi TNI khususnya TNI AD yang berupaya dibangun dan diselaraskan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah Era Reformasi. TNI bergerak cepat dan sigap melakukan introspeksi diri dan atas kesadaran diri mencabut Dwi Fungsi ABRI, menata diri dengan melaksanakan reformasi internal. Dalam waktu yang relatif singkat TNI secara internal telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan. Tercatat sudah 24 langkah reformasi yang dilakukan TNI, antara lain merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI: pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi Keputusan Pimpinan ABRI mulai 1 April 1999 sebagai Transformasi Awal,

penghapusan Kekayaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status, penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik, dan TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/day to day Politics. Juga mulai diberlakukannya doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007. Langkah perubahan yang signifikan tersebut menjadi latar belakang dan dikristalkan dalam bentuk perundangan yakni Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.

Reformasi internal yang dilakukan TNI tidak hanya ditanggapi positif kalangan dalam negeri, tetapi juga mendapatkan tanggapan dan pujian dari dunia internasional.. Dari sisi ilmu komunikasi, meningkatnya kepercayaan publik terhadap TNI dapat dikatakan sebagai keberhasilan TNI dalam membuat konsep dan terobosan strategis dalam sistem komunikasi dan informasi (dalam konteks pesan) kepada masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik tersebut merupakan feedback (umpan balik) terjadinya suatu proses komunikasi. Hal ini sesuai teori *Laswell* (ahli komunikasi asal Amerika Serikat). Efektivitas suatu proses komunikasi itu dapat dilihat dari *feedback*-nya, dalam hal ini kesan atau tanggapan masyarakat. TNI berhasil memanfaatkan prajurit - prajuritnya sebagai objek pesan sekaligus agen komunikasi sosial secara face to face kepada masyarakat. Tampilan prajurit TNI yang lebih simpatik dan peduli dengan kesulitan lingkungan menumbuhkan perspektif positif tersendiri. Kumpulan perspektif dari masyarakat akan berujung terciptanya opini publik.

Pimpinan TNI, para komandan satuan dan para pemangku tugas penerangan TNI juga memiliki andil besar dalam pembentukan opini publik. Mereka selama ini mampu membuat konsep terobosan sistem komunikasi dan mentransformasikan informasi dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui, mengerti, memahami dan

memberikan *feedback* berupa kepercayaan tinggi terhadap TNI.

Revolusi komunikasi dihadapkan dengan doktrin dan tradisi TNI AD

Pandangan tentang paham realis, idealis, dan liberalis digolongkan oleh ilmuwan ilmu hubungan internasional sebagai perspektif tradisional atau klasik, dimana pandangan klasik tersebut goyah dengan munculnya kaum konstruktivis, teori kritis, feminisme, dan posmodernis.² Dalam pembahasan ini menyoroiti tentang pandangan posmodernisme bila dikaitkan dengan fungsi pertahanan negara khususnya tentang revolusi komunikasi dihadapkan dengan doktrin dan tradisi TNI AD.

Posmodernisme merupakan sebuah teori yang memberikan penolakan terhadap gagasan-gagasan klasik sehingga perspektif posmodernisme bagaikan wadah bagi pandangan yang menolak *mainstream* yang ada *Jackson & Sorensen* menyatakan bahwa posmodernisme adalah suatu paham yang menolak anggapan tentang realitas, kebenaran, dan pemikiran, bahwa ada pengetahuan yang terus meluas tentang segala sendi kehidupan dunia dan termasuk di dalamnya manusia . Dengan demikian, teori posmodernisme merupakan wujud dari sebuah perlawanan atau pendobrak dari pendekatan-pendekatan tradisional yang ada.

Reformasi internal yang telah dilakukan TNI meliputi aspek struktur, doktrin dan kultur (tradisi) yang terus dijalankan secara bertahap. Untuk strata perwira, reformasi kultural sudah berjalan dengan sangat baik. Hampir tidak ada atau jarang kita mendengar perwira TNI melakukan pelanggaran dalam tugas dikarenakan sikap dan perilakunya terutama dalam tata cara berkomunikasi dengan masyarakat. Sementara pada strata Bintara dan Tamtama, terkadang masih terjadi pelanggaran yang disebabkan mereka belum merubah kebiasaannya, budayanya maupun sikap-sikapnya yang dulu. Tetapi secara kualitatif dan kuantitatif, grafiknya menurun. Perubahan sistem komunikasi dilakukan bukan

karena adanya tekanan dari luar, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah kebutuhan dalam menyongsong era demokratisasi dan globalisasi. Melalui reformasi internal, ke depan TNI akan lebih siap dan sekaligus *survive* dalam menghadapi berbagai tantangan yang makin kompleks sesuai konsep *no change no future*.

Hal tersebut selaras dengan yang termaktub dalam Doktrin TNI Tridarma Eka Karma (TRIDEK) yang disahkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2018, khususnya pada Bab VI Pembinaan Kemampuan poin 8 tentang Kemampuan Komunikasi dan Elektronika. Pimpinan TNI AD akan terus melakukan langkah-langkah inovatif dan strategis dalam menjawab tantangan di masa depan serta sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto dalam Seminar Revisi Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi tahun 2020. "Perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis menuntut kemampuan TNI AD untuk memformulasikan seperti apa tantangan dan tuntutan tugas serta proyeksi TNI AD di masa depan".

Bagaimana menciptakan komunikasi sosial TNI AD yang humanis dan adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia

Komunikasi itu adalah *Omni Present* artinya selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Secara etimologis istilah komunikasi atau yang dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin yakni *communicatio* dan bersumber pula dari kata *communis* yang berarti sama makna (Cangara, 2008:20). Jadi, ketika dua orang terlibat dalam satu percakapan maka selama ada kesamaan makna di antara keduanya maka mereka telah melakukan satu proses komunikasi. Komunikasi sangat erat kaitannya dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Sehingga berbagai disiplin ilmu dimaksud telah memberikan banyak kontribusi dalam perkembangan ilmu komunikasi seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik,

ilmu manajemen, linguistik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, definisi komunikasi yang ada saat ini sangat kompleks karena definisi komunikasi diberikan oleh berbagai pakar dengan perspektif yang berbeda-beda.

Harold D. Laswel (dalam Cangara, 2008:21) pakar ilmu politik mendefinisikan komunikasi sebagai: siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya? (*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*). Paradigma Laswel ini menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni Komunikator (*Communicator, Source, Sender*), Pesan (*Message*), Media (*Channel, media*), Komunikan (*communicant, receiver, recipient*) dan Efek (*effect, impact, influence*). Jadi, berdasarkan *pradigma Laswell* di atas komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Teritorial TNI AD, terdapat suatu sistem penyusunan produk dasar dan produk operasional yang disebut Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembinaan Teritorial (Sisrendal Binter).

Peranan Sisrendal Binter antara lain mengsinkronisasikan program Binter dengan program pemerintah, menyamakan visi dan persepsi antara TNI dengan pemerintah tentang pertahanan negara dan aspek kesejahteraan masyarakat serta memadukan Rencana Tata Ruang Pertahanan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RT,RW). Pada aspek ini, komunikasi yang diciptakan dalam upaya sinkronisasi sangat penting, tidak hanya kepada unsur pemerintah dalam kerangka koordinasi kelembagaan tetapi juga membangun komunikasi yang efektif dan komprehensif kepada masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek dalam mewujudkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang Tangguh dalam pola pembinaan Wawasan Nusantara dan Bela Negara. Diperlukan sebuah sistem komunikasi yang humanis dengan pendekatan antara lain pemanfaatan

ilmu dengan memperhatikan moralitas, menghindari materialisme dan pragmatisme serta penggunaan media dan sistem manajemen media yang baik.

Pada aplikasinya, TNI AD harus mampu meningkatkan manajemen transformasi informasi. Mampu memanfaatkan ruang-ruang kosong, khususnya kemajuan teknologi informasi untuk kepentingan publikasi. Perlu dipahami bahwa saat ini website, media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lainnya memiliki peran yang cukup signifikan pembentukan persepsi dan imej yang bermuara pada opini publik.

Yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kepercayaan publik adalah kemampuan dan kesanggupan dari seluruh prajurit TNI AD itu sendiri. Setiap individu prajurit mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terbawah adalah pelaku "*public relation*". Apa yang dilakukan prajurit seketika akan dilihat dan tersebar di publik. Setiap individu harus mampu menjaga citra prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.



Penulis ingin memberikan sebuah konsep dengan bahasa yang sederhana yakni tentang langkah dalam menciptakan sebuah sistem interaksi antara TNI AD dengan latar belakang doktrin dan tradisi yang kuat dengan masyarakat terutama kaum milenial sebagai potensi penerus bangsa, yang telah mengalami perubahan sistem kehidupan sosial yang cepat dan cenderung berkembang dalam "pop culture". Sistem interaksi pada paradigma baru ini diharapkan lebih adaptif, kreatif, inovatif dan komunikatif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Seluruh personel TNI AD mulai dari level pengambil

keputusan hingga level operasional di lapangan seyogyanya mampu sebagai public relation yang mengenalkan reformasi dan paradigma baru di TNI AD. Menciptakan sebuah terobosan "komunikasi dengan cara mereka" adalah sebuah langkah bijak agar interaksi lebih efektif dan efisien serta tersampaikan tanpa harus merubah doktrin dan tradisi TNI AD. TNI AD dengan postur kekuatan dan kemampuan yang dimiliki tetap menjadi Jati Dirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Profesional dan Tentara Nasional yang mampu menjaga kedaulatan negara dan melindungi rakyatnya namun juga mampu menampilkan performa yang memiliki wawasan luas, memahami public speaking, berpenampilan menarik (*good looking*) serta memiliki kemampuan dalam menggunakan media sosial berbasis teknologi sebagai sarana komunikasi di era digital saat ini.

Pada penerapan fungsi Komunikasi Sosial dalam kegiatan Pembinaan Teritorial kepada masyarakat binaan, misalnya pada saat pelaksanaan Karya Bhakti. Selama ini kita terkungkung pada sasaran pembersihan selokan dan parit. Padahal, TNI AD dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara Komsos Kreatif dengan mengajak serta kalangan milenial melakukan program bersih pada sarana dan fasilitas tempat mereka Kongkow, membuat penamaan sudut lokasi yang memiliki spot paling bagus dengan nama Tokoh/Pahlawan Indonesia, menuliskan *quote* – *quote* tentang Wawasan Nusantara dan Bela Negara sehingga pesan TNI AD dapat diterima, tetapi dengan cara mereka. Selanjutnya dapat membuat Lomba Cipta Lagu bertema Cinta Tanah Air kepada para Musisi Jalanan sehingga secara tidak langsung mereka tertarik dan mempelajari tentang Sejarah Bangsa Indonesia. Bersosialisasi dengan membentuk wadah/organisasi sesuai *passion* yang trend saat ini, misalnya lomba/event olahraga Binaraga, *Body Contest*, kegiatan seni budaya, latihan bersama bertema pendidikan ataupun mengadopsi kalangan milenial yang sedang gandrung dengan smartphone dengan membuat aplikasi di media sosial tentang

ajakan cinta produk dalam negeri baik makanan, pakaian dan aplikasi lainnya. Kesemuanya itu demi menciptakan network dan sinergi antara TNI AD dan masyarakat. Namun, dengan cara mereka tanpa harus mengubah doktrin dan tradisi TNI AD. Positif



Hal yang paling penting dilakukan awal adalah menciptakan sistem komunikasi yang adaptif dan humanis di kalangan internal TNI AD sendiri. Mampu merubah mindset dan menerapkan tindakan bahwa *seorang Pemimpin bisa memberikan pengayoman dan menanamkan keyakinan kepada organisasi (penulis menggunakan kata organisasi menggantikan kata anak buah – karena hakikatnya sebuah organisasi adalah team work yang saling melengkapi, bukan antara atasan dan bawahan dalam perseptif hubungan komunikasi).*

DAFTAR REFERENSI

1. Hurlock, Elizabeth B – Psikologi Perkembangan – Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan edisi 5 (2011 : 250)
2. Gregorius Genep Sukendro – Komunikasi Militer dalam kepegangan Pop Culture (kajian kritis atas media massa)
3. Dimiyati – Menjaga kredibilitas TNI di mata public – alumnus Fisipol UGM
4. Fikar Damai Setia Gea – Komunikasi Humanis – Paradigma dan Persektif

Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto, Abituren Akmil 2002 jabatan Kasi Binmatsisfo Infolahadam V/Brawijaya. Saat ini sedang mengikuti Dikreg LX Seskoad.



MAYOR CAJ ANDI HAMZAH MAPPIARE, S.SOS.

UPAYA PENGELOLAAN POTENSI DISINTEGRASI BANGSA PADA KONFLIK BAHASA DI BELGIA

Pendahuluan

Belgia merupakan sebuah negara maju di kawasan Eropa Barat dengan sistem monarki konstitusional yang menjadikan Raja sebagai simbol negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Sebagai sebuah negara maju, Belgia tidak terlepas begitu saja dari konflik diantara penduduk. Konflik tersebut bukanlah konflik etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah, melainkan sebuah konflik diantara penduduk Belgia yang berbahasa Belanda atau seringkali disebut *Flemish* dengan penduduk Belgia lainnya yang berbahasa Perancis atau disebut juga Waloon. Seperti yang diberitakan di Kompas (27/4/2010) tentang konflik politik yang berakar dari bahasa sampai menumbangkan sebuah pemerintahan koalisi seorang Perdana Menteri di Belgia. Sebuah negara kecil dengan penduduk 10,6 juta jiwa, Belgia yang berdekatan dengan Belanda tergolong negara maju dengan perekonomian yang pesat. Negeri ini juga menjadi markas besar NATO, karena itu secara militer juga kuat. Di Belgia terdapat tiga bahasa dominan, yakni bahasa Belanda, Perancis, dan minoritas Jerman. Pengguna bahasa Belanda merupakan yang terbanyak, yakni mencapai angka 6 juta jiwa. Bahasa Perancis menduduki peringkat kedua dengan jumlah pengguna sebesar 3,5 juta jiwa, dan sisanya 1 juta pengguna bahasa minoritas Jerman.

Kendati mayoritas, pengguna bahasa Belanda yang relatif lebih makmur secara ekonomi ketimbang pengguna bahasa Perancis dan bahasa campuran, selama bertahun-tahun merasa didominasi oleh masyarakat pengguna bahasa

Perancis. Wujudnya, konstitusi Belgia ditulis dalam bahasa Perancis. Ini terjadi karena penduduk yang berbahasa Perancis lebih mendominasi pemerintahan sejak Revolusi 1803 sehingga konstitusi negara sebagai salah satu simbol bangsa ditulis dalam bahasa Perancis. Setelah melalui perjuangan panjang hampir 100 tahun, konstitusi versi bahasa Belanda baru berhasil ditulis. Bagi warga yang berbahasa Belanda, dominasi bahasa Perancis dalam kehidupan bernegara merupakan bentuk lain dari penjajahan. Sebab, penjajahan tidak saja dalam bentuk politik dan ekonomi, tetapi juga budaya yang di dalamnya ada bahasa. Karena menyangkut harga diri, maka tidak bisa dihindari bahwa pengguna bahasa Belanda melakukan perlawanan. Rebutan dominasi bahasa di Belgia tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Perdana Menteri Yves Leterme hingga pemerintahan koalisi yang dipimpinnya jatuh. Kita bisa membayangkan bagaimana repotnya mengelola sebuah negara yang memiliki konstitusi dengan dua versi bahasa. Akan menjadi lebih rumit jika penduduk yang berbahasa minoritas juga menuntut konstitusi dengan versi bahasa mereka. Padahal, konstitusi sebagai sumber hukum penyelenggaraan negara mesti jelas agar tidak melahirkan multitafsir.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa pokok persoalan sebagai berikut : **Pertama.** Bagaimana latar belakang terjadinya masalah dinegara tersebut ? **Kedua.** Bagaimana langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi Negara tersebut ? **Ketiga.** Bagaimana **Lesson learned** (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif

komunikasi?. Dengan demikian maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :” **Bagaimana Upaya Pengelolaan Potensi Disintegrasi Bangsa pada Konflik Bahasa Di Belgia?**”.

Pembahasan

Para pakar bahasa mempercayai bahwa bahasa tidak saja berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan berinteraksi sosial, tetapi lebih dari itu bahasa juga merupakan identitas sosial dan kultural. Sebagai identitas yang melekat pada seseorang, bahasa menandai kelas sosial penggunanya. Ada ragam bahasa tertentu pada pengguna bahasa dengan strata sosial tertentu. Semua atribut yang dimiliki seseorang, seperti pangkat, jabatan, kekayaan, status sosial, kepercayaan dan sejenisnya, bisa disembunyikan rapat-rapat, kecuali bahasa. Sebagai realitas simbolik, bahasa menggambarkan dunia batin penggunanya. Lihat saja bagaimana bahasa seseorang tatkala sedang bahagia, susah, kecewa, dan marah., Selain sebagai identitas sosial dan kultural, bahasa juga mengandung ideologi. Artinya, berbahasa tertentu juga membawa ideologi tertentu. Memilih kata-kata tertentu artinya juga bermaksud memperjuangkan ideologi tertentu. Sebab, pada hakikatnya kata tidak pernah tidak bermakna. Pemilihan kata-kata tertentu mengandung makna tertentu pula. Sebagai pembawa ideologi dan identitas sosial, tidak jarang bahasa menjadi penyebab konflik sosial yang tidak begitu saja mudah diatasi. Para sosiolog menyimpulkan ada tiga akar masalah yang umumnya memicu konflik berkepanjangan, yakni ras atau suku, agama, dan bahasa. Banyak bangsa terutama yang multilingual, tak terkecuali bangsa maju, menghadapi masalah bahasa.

Bagaimana latar belakang terjadinya masalah di negara Belgia?

Belgia merupakan sebuah wilayah di daratan Eropa yang semula merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Belanda hingga pada akhirnya memerdekakan diri pada tanggal 4 Oktober 1830 yang ditandai dengan

kemunculan gerakan-gerakan separatis masyarakat Belgia. Gerakan separatis tersebut terutama muncul di wilayah Waloonia yaitu wilayah berbahasa Perancis yang sebagian besar penduduknya beragama Katolik –bukan Protestan seperti yang dianut oleh Kerajaan Belanda (Kohler, 2010:58). Tidak hanya dari kawasan Waloonia, gerakan separatis juga dilakukan oleh kaum bangsawan di Brussels dan Flanders yang merasa tidak mendapatkan perwakilan yang berimbang dari Kerajaan Belanda. Pada tahun 1839 atau sembilan tahun setelah Belgia merdeka dari Belanda, Perancis mulai mendominasi setiap segi kehidupan masyarakat Belgia mulai dari konstitusi pemerintahan sampai pada sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Penggunaan bahasa Perancis di Belgia melanda semua tingkatan sosial masyarakat. Bukan hanya digunakan oleh kaum proletar, tetapi bahasa Perancis bahkan digunakan oleh kaum bangsawan dan borjuis yang tinggal di kawasan *Flemish* yang notabene merupakan sebuah kawasan berbahasa Belanda di Belgia. Hal ini secara tidak langsung mengisolasi para *Flemish* dalam mempergunakan bahasanya terutama dalam bidang perpolitikan karena konstitusi Belgia saat itu menjadikan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi dalam semua kegiatan termasuk dalam hal administrasi negara. Kondisi ini jelas sangat kontras dengan jumlah populasi warga *Flemish* di Belgia pada tahun 1880 yang mencapai 50% di Brussels (Kenneth: 1986:73).

Brussels sebagai ibukota negara memang merupakan target utama dalam upaya penghapusan penggunaan bahasa Belanda dari wilayah Belgia. Merasa menjadi orang asing di negara mereka sendiri, orang-orang *Flemish* mulai melakukan gerakan-gerakan kampanye penggunaan bahasa Belanda baik itu di tingkat sekolah, pemerintah, dan kalangan masyarakat luas. Gerakan kampanye bahasa Belanda ini dilakukan secara menyeluruh dengan target utama berupaya menyakinkan pemerintah Belgia mengenai akar kebudayaan mereka. Upaya ini ternyata tidak sia-sia. Pada tahun 1898, akhirnya

pemerintah Belgia mulai melegalkan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi di Belgia. Orang *Flemish* kemudian semakin bersemangat mensosialisasikan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi Belgia dengan jalan membangun sekolah-sekolah dan sarana-sarana administrasi dalam bahasa Belanda demi menunjang upaya ini.

Bagaimana langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi negara tersebut?

Upaya mewujudkan keseimbangan kekuatan antara dua bahasa utama di Belgia, yang merupakan sebuah obsesi tiada akhir dari para elit politik Belgia menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan karena adanya realitas sosial-bahasa yang muncul. Aturan hukum bahwa setiap keputusan pemerintah Brussels harus diambil berdasarkan kesetaraan bahasa (tiap kelompok bahasa harus secara formal setuju terhadap keputusan itu) menjadi kian tidak dapat dipertahankan karena relatif terpinggirkannya bahasa Belanda (*Flemish*) di *Brussels*.

Untuk mencegah perpecahan Belgia akibat konflik bahasa ini, partai-partai yang kini berkoalisi mencapai kesepakatan untuk melaksanakan reformasi pemerintahan. Dalam kesepakatan setebal 180 halaman ini juga tertera, pemerintahan baru harus dibagi seimbang antara kekuatan politik berbahasa Perancis dari wilayah Walonia dan politisi dari wilayah berbahasa *Flemish*. Pemerintahan baru Belgia juga harus menghadapi tugas untuk memulihkan keuangan negara. Dan Belgia telah mengumumkan program penghematan sebesar 11,3 milyar Euro atau sepersepuluh dari anggaran negara. Dengan program penghematan ini, tunjangan pengangguran akan dikurangi dan tunjangan pensiun akan dinaikkan. Menanggapi rencana ini, serikat buruh Belgia menyatakan akan melakukan protes. Perubahan konstitusi (Desember 1970), memfasilitasi pembentukan tiga dewan budaya (Belanda, Prancis, Jerman), seperti diminta oleh orang Flandria dan memberi sejenis otonomi, yang segera dipraktikkan. Selain itu ada pula, untuk

memenuhi keinginan orang Walonia, tiga wilayah ekonomi (Flandria, Walonia, dan Brussel). Yang lain akan diatur dalam sebuah undang-undang dengan mayoritas khusus. Ketentuan-ketentuan yang kurang jelas ini tentunya memicu perdebatan sengit, terutama mengenai kewenangan konkrit wilayah-wilayah ini, perbatasan wilayah Brussel dan undang-undang daerah Voeren. Oleh karena itu mayoritas 2/3 yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini tidak bisa dicapai. Akhirnya, pada tahun 1977, Pakta Egmont yang terkenal itu selesai, yang mengatur kekuatan regional. Hal ini memperkuat posisi para penutur bahasa Prancis di Brussel dan melemahkan posisi orang Flandria. Perjanjian ini sangat kontroversial, yang dimaksudkan sebagai pasifikasi komunitas bahasa, oleh karena itu hal ini tidak dilanjutkan. Sebuah kelompok di dalam *Volkunie*, salah satu pihak yang telah menandatangani perjanjian, tidak menerima ini dan merobeknya. Mereka lalu membentuk partainya sendiri, partai Blok Flandria (*Vlaams Blok*), yang akan berkembang menjadi partai sayap kanan ekstrem.

Fase kedua dalam federasi Belgia adalah reformasi negara tahun 1980. Kekuatan dewan budaya, yang sekarang disebut komunitas, telah diperluas. Dewan regional Flandria dan Walonia akhirnya juga dibentuk. Komunitas-komunitas ini sekarang bertanggung jawab untuk masalah pribadi, seperti kesejahteraan dan kesehatan. Wilayah bertanggung jawab atas aspek ekonomi dan terkait lokasi, termasuk perencanaan tata ruang, perumahan, lingkungan dan kebijakan ketenagakerjaan. Wilayah Flandria dan Komunitas Flandria, sebagian besar berwenang atas wilayah yang sama (Wilayah ini tidak berwenang untuk Brussel), bergabung bersama untuk membentuk satu Parlemen Flandria dan satu Pemerintah Flandria. Pada tahun 1980 mereka tidak berhasil untuk membuat ketentuan bagi Wilayah Brussel yang dwi bahasa; kewenangan-kewenangan regional untuk sementara berada di tangan pemerintah federal. Pada tahun 1988-89, Daerah Ibu Kota Brussel akhirnya juga

memiliki pemerintahan dan parlemennya sendiri. Kekuasaan daerah dan masyarakat masing-masing telah diperluas, termasuk pekerjaan umum dan transportasi serta pendidikan. Untuk sementara ini perubahan konstitusi terakhir terlaksana pada tahun 1993. Hal ini menekankan perubahan Belgia menjadi sebuah negara federal. Semua negara bagian mendapatkan kewenangan spesifik mereka dan lebih banyak anggaran keuangan. Perlembagaan baru ini menjadikan keadaan provinsi Brabant yang dwibahasa menjadi sulit. Maka pada waktu yang sama provinsi ini dimekarkan menjadi Brabant Flandria, Brabant Walonia, dan Brussel. Kedua provinsi ini lalu resmi terbentuk pada tanggal 1 Januari 1995. Daerah Ibukota Brussel lalu dikeluarkan dari pembagian administrasi berdasarkan provinsi ini.

Bagaimana Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi

Dalam melakukan proses negosiasi diperlukan adanya strategi dan taktik agar tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi dan tercapai. Strategi dan taktik ini pada dasarnya bukan merupakan dua komponen yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam melakukan proses negosiasi. *Gregory Foster (1992)* dalam artikelnya yang berjudul *A Conceptual Foundation for the Development of Strategy* menjelaskan, bahwa strategi merupakan penggunaan segala instrumen kekuatan yang ada, baik itu militer maupun non-militer yang terkoordinasi dalam suatu negara atau aliansi untuk mencapai obyek atau kepentingan dan tujuan yang dimaksud dan yang ingin dicapai (*Foster, 1992*). Sedangkan taktik merupakan tindakan adaptif jangka pendek yang memiliki tujuan untuk membangun atau mencapai strategi luas yang kemudian memberikan stabilitas serta kesinambungan dan arah bagi perilaku yang melakukan proses negoisasi. Taktik merupakan komponen yang bisa dikatakan memiliki kedudukan dibawah strategi. Taktik memiliki sifat yang terstruktur serta terarah dan didorong oleh adanya perhitungan yang strategis (*Lewicki, 2012*).

Negosiasi perlu menggunakan strategi dan taktik agar tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi dan tercapai. Kedua komponen ini berbeda namun keduanya saling melengkapi dalam melakukan negosiasi. Taktik dan strategi memiliki berbagai macam bentuk, dimana semua bentuk-bentuk tersebut akan menunjang dari keberhasilan dari adanya negosiasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang ada. Selain taktik dan strategi adapula faktor lain penentu keberhasilan negosiasi, seperti eksistensi masing-masing pihak, posisi negosiator, frekuensi kekuasaan, frekuensi negosiasi, kelompok yang terlibat serta eksistensi tenggat waktu perundingan dan eksistensi perjanjian. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari proses negosiasi itu sendiri. Persiapan negosiator, tanpa adanya persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam negosiasi tidak akan memuaskan bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi semua pihak yang terlibat. Cara negosiator memulai negosiasi juga menentukan sukses tidaknya suatu negosiasi, yakni pemilihan waktu, tempat, pengaturan tempat duduk, menciptakan suasana yang positif, hingga merumuskan tawaran pembuka perlu diperhatikan negosiator untuk memulai negosiasi yang baik. Negosiasi yang sukses tidak hanya hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. Selain itu, kompromi juga merupakan upaya menuju pencapaian kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Berikutnya, menghindari kesalahan teknis, yakni mengajukan permintaan yang tidak logis, membuat konsesi bebas, takut, diam, dan marah adalah contoh kesalahan teknis yang harus dihindari saat bernegosiasi. apabila negosiator melakukan kesalahan teknis, kepercayaan dari pihak lawan akan hilang dan pada akhirnya kesepakatan pun gagal tercapai (*Hartman dalam Purwanto, 2006*).

Dengan adanya kemampuan yang baik dalam berdiplomasi dan bernegosiasi diharapkan adanya komunikasi yang baik dengan negara-negara berkembang dan

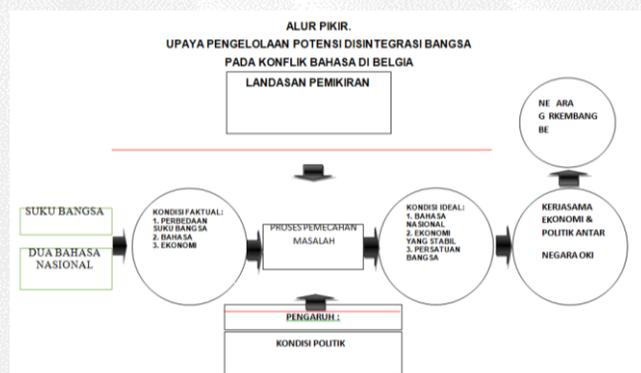
negara maju untuk menunjang tujuan pembangunan kerjasama di masa yang akan datang. Dalam mencapai hasil diplomasi dan negosiasi yang diinginkan diperlukan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan persuasif serta mampu melakukan lobby yang efektif. Pada tingkat kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut.

Penutup

Sebagai akhir dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa krisis negara Belgia muncul dari kontradiksi antara pembagian wilayah sosial, ekonomi, dan bahasa di satu sisi, dan penetapan secara baku terkait batas bahasa dan wilayah di sisi lain yang ditujukan untuk meredam konflik kebahasaan-kewilayahan sebelumnya. Penetapan secara tegas mengenai kawasan bilingual Brussels memainkan peran penting dalam proses perdamaian konflik bahasa Belgia yang memiliki kontradiksi dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi Brussels serta perekonomian Belgia. Brussels telah menjadi pengambil keputusan yang tepat dalam strategi kelangsungan hidup Belgia. Meskipun Brussels sendiri dihadapkan pada kontradiksi-kontradiksi terkait kebahasaan, sosial-budaya dan ekonomi tetapi strategi Belgia untuk menjadikan Brussels sebagai wilayah bilingual, ternyata cukup efektif meredam konflik kebahasaan yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Disadari bahwa perbedaan bahasa sebagai bahasa nasional akan menjadi suatu masalah dan berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasikan bangsa, sehingga Belgia harus menentukan satu bahasa nasional yang akan digunakan sebagai jati diri bangsanya.

Strategi negosiasi *win-win* merupakan pilihan yang tepat. Strategi win-win lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Negosiasi ini pihak pertama akan menang dan pihak kedua akan menang, dalam jenis negosiasi ini yang menguntungkan kedua

pihak, sehingga banyak orang yang selalu bernegosiasi untuk mendapatkan keinginan kedua pihak. Kelebihan strategi negosiasi *win-win* adalah satu sisi sama-sama butuh, otomatis kedua belah pihak berupaya untuk cepat menyelesaikan masalah. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih panjang. Strategi ini dipilih jika diinginkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perundingan.



DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.uin-malang.ac.id/r/100401/Tragedi-Bahasa-di-belgia.html>
- "KONFLIK BAHASA DI BELGIA, UPAYA PENGELOLAAN POTENSI DISINTEGRASI BANGSA" oleh Rizki Damayanti, Jurnal Universitas Paramadina Vol. 10 No. 3 Desember 2013
- <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/1597/849/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_bahasa_di_Belgia

Mayor Caj Andi Hamzah M. S.Sos. adalah Abituren Semapa PK 2002, Jabatan Kasimindik Rindam XIII/Merdeka. Saat ini sdg mengikuti Dikreg LX Seskoad



LETKOL INF NANANG TRI MARTONO, S.PD.

MENGURAI BENANG KUSUT KONFLIK DI SURIAH DAN PENYELESAIANNYA MELALUI UPAYA DIPLOMASI DAN NEGOSIASI

Pendahuluan

Sengketa internasional adalah situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban dalam perjanjian. Sengketa internasional mencakup tidak hanya sengketa antara negara, namun negara dengan individu, badan korporasi, serta badan bukan negara di pihak lain. Awal munculnya sengketa internasional di Suriah dimulai dari Arab Spring (pemberontakan Arab), bertujuan menggulingkan serta mengkuadeta pemimpin negara Suriah karena bertindak otoriter, korup, dan menindas dalam memimpin. Pemberontakan tersebut menggunakan teknik demonstrasi, pawai, serta pemanfaatan media sosial.¹ Terhadap sengketa Suriah terdapat keterlibatan negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap Suriah dimana hal tersebut semakin memperparah sengketa, di antaranya negara Rusia dan Cina, Amerika Serikat, dan Iran. Ketiga negara tersebut memiliki keterlibatan yang lebih menonjol dibandingkan negara-negara lain. Rusia memilih melakukan intervensi militer dan diplomatik secara sendiri terhadap pemerintahan Suriah. Sementara China memasok senjata dan menyuplai perlengkapan militer bagi Suriah. Iran membantu pemerintahan Suriah dengan memasok senjata serta mengirimkan pelatih militer ke Suriah. Amerika Serikat membantu kelompok oposisi dengan mengirimkan bantuan non lethal aid (non senjata) dan melalui forum *Friends of Syria* Amerika Serikat dan negara lain yang mendukung transisi pemerintahan di Suriah mencapai kesepakatan

penting seperti pengakuan kelompok oposisi secara resmi sebagai perwakilan rakyat Suriah.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi persoalan terkait penyelesaian konflik di Suriah melalui upaya diplomasi dan negosiasi sebagai berikut : Pertama, bagaimana latar belakang terjadinya konflik di Suriah? Kedua, bagaimana langkah strategis yang dilakukan pemerintah Suriah dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi melalui upaya diplomasi dan negosiasi? Ketiga, Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi dalam proses penyelesaian konflik di Suriah? Mendasari ketiga persoalan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana mengurai benang kusut konflik di suriah dan penyelesaiannya melalui upaya diplomasi dan negosiasi?

Pembahasan :

Latar belakang terjadinya konflik di Suriah

Keberhasilan Revolusi Tunisia dan Mesir pada awal tahun 2011 mendorong para pemuda dan aktivis Suriah untuk menggelar aksi serupa di negaranya. Pada tanggal 15 Maret 2011 terjadi aksi protes rakyat di Daara, hal tersebut dikarenakan satu bulan sebelumnya sekelompok pelajar yang menuliskan slogan anti pemerintah di tembok kota dipenjara oleh polisi Daara selama satu bulan, dan saat dilepas diketahui bahwa mereka mengalami penyiksaan di penjara². Eskalasi demonstrasi kemudian menyebar ke berbagai kota di Suriah dan

¹ M. Agastya ABM, *Arab Spring Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah*, (Jogjakarta : IRCISoD, 2013), hlm. 10

² Politik Arab Spring di Timur Tengah (2011), dikutip dari : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>.

pada tanggal 25 Maret 2011 demonstrasi besar terjadi di 7 provinsi dari 14 provinsi di Suriah. Hal tersebut kemudian memaksa Presiden Bashar Al-Assad untuk berpidato di depan parlemen pada tanggal 31 Maret 2011. Pada bulan Juni 2011 tentara Suriah menembaki puluhan demonstran di kota Hamah yang menewaskan puluhan orang. Tindakan yang dilakukan tentara Suriah tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia, sehingga dunia internasional mengambil sikap. Pada bulan Agustus 2011, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada dan Perancis menyatakan rezim Suriah tidak lagi sah dan juga melakukan pengusiran terhadap duta besar Suriah di masing-masing negara tersebut.

Pada bulan Juli 2011, sebuah video tersebar melalui youtube dan dalam video tersebut terekam tujuh anggota militer Suriah dipimpin oleh Kolonel Rial Al-Assad yang menyatakan membelot dari ketentaraan Suriah dan mendirikan Free Syrian Army (FSA).³ FSA mengaku melakukan pengeboman di kantor Keamanan Nasional Suriah pada pertengahan Juli 2011, yang menewaskan delapan pejabat elit militer Suriah. Negara anggota PBB dapat meminta perhatian dari Dewan Keamanan terhadap permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dasar hukum menurut Piagam PBB adalah setiap anggota PBB (Pasal 35 Piagam), Majelis Umum (Pasal 11 ayat (3)), atau Sekretaris Jenderal (Pasal 99). Negara bukan anggota

PBB dapat membawa sengketa ke Dewan Keamanan asalkan menerima kewajiban Pada tanggal 25 September 2011, Presiden Perancis Hollande menyatakan dukungannya terhadap rakyat Suriah dan meminta dilindunginya liberated zone (daerah yang dikuasai pemberontak).⁴ Bentuk perlindungan yang diusulkan adalah pemberlakuan “no fly zone” (daerah larangan terbang) di wilayah yang dikuasai pemberontak, dengan diawasi oleh pesawat tempur negara adidaya. Rencana tersebut diveto oleh Rusia dan Cina karena sama saja dengan mengizinkan militer asing

terjun langsung ke Suriah. Pada awal bulan Februari 2012 terjadi serangan bom di provinsi Homs disusul berbagai operasi militer yang merupakan operasi paling kejam selama masa revolusi. Hal ini akhirnya membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No. S/RES/2042 tanggal 14 April 2012 mengenai pengiriman 30 tim pemantau awal non militer di Suriah untuk memantau gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut tidak berjalan efektif karena pada tanggal 25 Mei 2012 terjadi pemberontakan di Taldou yang berujung penembakan oleh tentara Suriah. Sehingga dalam sidang tanggal 19 Juli 2012, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi untuk menjatuhkan sanksi bagi Suriah, namun diveto oleh Rusia dan Cina.

Upaya penyelesaian sengketa Suriah selain dilakukan PBB adalah melalui Liga Arab dan Uni Eropa. Pada bulan November 2011 Liga Arab membekukan keanggotaan Suriah dan memberlakukan sanksi ekonomi dan politik atas pemerintah Suriah.⁵ Selain itu Liga Arab memerintahkan anggotanya agar menarik duta besar mereka dari Damaskus. Pada tanggal 19 Desember 2011, Suriah menyepakati masuknya misi pengamat Liga Arab yang membawa kesepakatan penyelesaian sengketa.⁶ Suriah awalnya menyetujui isi dari protokol pertama kesepakatan tersebut, namun ketika ditawarkan protokol kedua yaitu agar Bashar Al-Assad menyerahkan kekuasaan agar tercapai penyelesaian sengketa Suriah menolak. Uni Eropa memberlakukan embargo senjata dan penerbangan serta sanksi terhadap 13 pejabat Suriah yang dipandang bertanggung jawab. Sanksi yang diberikan adalah larangan pemberian visa dan pembekuan aset, yang mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2011. Sanksi tersebut kemudian dicabut pada tanggal 28 Mei 2013 karena tidak berhasil meminimalkan sengketa. Usaha terakhir dunia internasional adalah membentuk negara gabungan Arab dan Barat yang terwujud dalam Konferensi Jenewa.

Pihak yang terlibat dalam sengketa Suriah terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pihak

3. Tentara Pembebasan Suriah, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Pembebasan_Suriah

4. Prancis Minta PBB Berikan Dukungan untuk Rakyat Suriah, dikutip dari <https://news.detik.com/internasional/d-2038004/prancis-minta-pbb-berikan-dukungan-untuk-rakyat-suriah>

5. Politik Arab Spring di Timur Tengah (2011), dikutip dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>

6. Suriah Izinkan Pengamat Liga Arab Masuk, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/12/20/suriah.izinkan.pengamat.liga.arab.masuk>

internal sengketa terdiri dari:

a. Pendukung Pemerintahan:

1) Bashar Al-Assad yang merupakan Presiden Republik Arab Suriah, Sekretaris Wilayah Partai Ba'ath dan anak mantan Presiden Hafizh Al-Assad. Bashar Al Assad menggantikan ayahnya sebagai Presiden Suriah segera setelah wafatnya pada 10 Juni 2000. Saat dilantik sebagai presiden, Bashar Al-Assad menjanjikan Suriah lebih modern dan demokratis namun janji tersebut belum terwujud walaupun sudah ada sejumlah perubahan dalam pemerintahannya. Rakyat Suriah sendiri merasakan bahwa gaya kepemimpinan Bashar Al-Assad adalah diktator dan otoriter.

2) Syiah Nushairiyah. Salah satu faktor penting yang berperan dalam sengketa Suriah adalah faktor ideologi/agama. Faktor ideologi ini khususnya Nushairiyah merupakan akar krisis Suriah, yang kemudian mencuat ke permukaan publik dunia lewat Syrian Spring. Nushairiyah merupakan kelompok Syi'ah ekstrim yang muncul pada abad ke 3-H.

b. Pendukung Pemberontak/Oposisi, yakni FSA beraliansi dengan SNC dan *National Coordination Body for Democratic Change*.

Pihak eksternal sengketa Suriah terdiri dari Pendukung Pemerintahan yaitu Rusia, China, dan Iran. Dalam hal ini Rusia dan China tidak ingin kepentingan mereka di Suriah terganggu, karena Suriah merupakan negara yang berarti bagi Rusia. Rusia dikenal sebagai negara eksportir persenjataan militer dan Suriah termasuk salah satu negara importirnya dalam jumlah besar. Rusia tentu tidak ingin rugi dengan pembatalan kontrak jual beli senjata oleh Suriah, apalagi di saat krisis ekonomi yang tengah dialami oleh Eropa. Rusia sebagai negara yang kebutuhan minyaknya sebagian besar diimpor dari Iran berkepentingan menjaga hubungan diplomatiknya dengan negara tersebut, yang merupakan sekutu utama Suriah. Cina yang kini menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Serikat, tentunya tidak ingin pasokan

minyak dari Suriah ke negaranya terganggu begitu juga dengan hubungan dagang antara kedua negara. Cina memandang penting Suriah karena negara itu merupakan salah satu eksportir utama minyak Cina setelah Arab Saudi dan Iran. Suriah juga berperan sebagai pintu masuk pasar ekspor komoditas Cina ke negara-negara Timur Tengah. Cina juga ingin menjaga hubungan baiknya dengan Iran sebagai negara utama pemasok kebutuhan minyak Cina, yang sikap politiknya sangat mendukung pemerintahan Presiden Bashar Al Assad. Sementara Iran menganggap bahwa Bashar Al-Assad adalah salah satu benteng penting Iran dalam menghadapi ancaman Israel. Dalam hal ini, Kebijakan politik luar negeri Iran yang tegas terhadap Israel membuatnya membutuhkan Bashar Al-Assad yang selama ini juga berada di garis depan perlawanan terhadap Israel. Pembelaan Iran adalah upaya pembelaan keamanan nasionalnya sendiri, jika rezim Bashar Al-Assad jatuh dan rezim yang pro Barat berkuasa maka keamanan Iran jelas terancam.

Sementara itu, pendukung Pemberontak/Oposisi adalah Amerika Serikat yang dalam sengketa Suriah mendukung kelompok oposisi dengan mengirimkan bantuan non senjata pada kelompok oposisi tersebut, selain itu Amerika Serikat membentuk organisasi yang berisi negara Barat yang pro pada kelompok oposisi. Sistem PBB sampai saat ini sangat dipengaruhi oleh kedudukan Amerika Serikat yang penting dalam hampir semua lapangan. Diakui bahwa Amerika Serikat merupakan negara pemberi bantuan terbesar serta peranannya jauh lebih positif dari negara besar lain manapun, dan hingga saat ini belum ada pihak lain yang dapat mengganti peranan itu. Namun sebenarnya Amerika Serikat juga memiliki kepentingan terhadap negara Suriah. Strategi politik luar negeri Amerika Serikat selama ini terlihat sejalan dengan sebuah dokumen terkait strategi orang Zionis di Timur Tengah bernama *The Oded Yinon's Plan*. *The Oded Yinon's Plan* dimuat di sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Departemen Informasi

Organisasi Zionis, yang kemudian diterjemahkan dan dipublikasikan oleh *Association of Arab-American University Graduates* pada tahun 1982. Isi dokumen ini sangat berkaitan dengan strategi politik negara Israel, dimana poin terpenting dalam dokumen ini adalah bahwa untuk mewujudkan Israel Raya negara Arab perlu dipecah ke dalam negara yang lebih kecil.

Langkah strategis menyelesaikan konflik di Suriah.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik melalui diplomasi dan negosiasi yang diwujudkan dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan serta melakukan beberapa tindakan terkait penyelesaian sengketa Suriah melalui Utusan Khusus Gabungan PBB.⁷ Berdasarkan resolusi-resolusi yang telah dibuat Dewan Keamanan, Majelis Umum, serta Sekretaris Jenderal dapat dilihat bahwa ketiga organ utama PBB tersebut telah berperan sesuai dengan yang wewenang yang dicantumkan dalam Piagam PBB. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan tersebut bersifat mengikat sesuai yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 Piagam PBB, bahwa tanggung jawab untuk menjaga perdamaian internasional telah diserahkan pada Dewan Keamanan PBB dan negara anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Jadi apabila negara yang bersengketa tidak menaati keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan maka akan dijatuhkan sanksi terhadapnya. Penyelesaian sengketa Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih tepat dilakukan secara damai bukan dengan kekerasan, hal ini karena sengketa yang semakin meluas dan mempengaruhi stabilitas dari negara Suriah baik secara politik, ekonomi, dan sosial. PBB telah melakukan langkah negosiasi dalam bentuk Konferensi Jenewa, meskipun belum ditemukan jalan keluar namun para pihak masih menginginkan penyelesaian yang komprehensif dan adil. Hasil Konferensi Jenewa berupa pemerintahan transisi

masih terus diusahakan oleh negara gabungan Arab-Barat. Langkah mediasi dan jasa-jasa baik yang telah diterapkan oleh PBB menemui kegagalan, berdasarkan Pasal 33 Piagam masih ada langkah konsiliasi, arbitrase, serta melalui Mahkamah Internasional. Namun, ketiga langkah tersebut tidak dapat diterapkan pada sengketa Suriah, karena konsiliasi sifat putusannya tidak mengikat, jadi tidak akan efektif apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase dan Mahkamah Internasional juga tidak dapat diterapkan karena untuk menyerahkan sengketa ke kedua badan tersebut harus berdasarkan kesepakatan negara, dan untuk pihak yang bersengketa di Mahkamah Internasional harus negara, tidak bisa salah satu pihaknya individu atau organisasi internasional. Berdasarkan uraian di atas maka langkah penyelesaian sengketa Suriah yang tepat melalui PBB adalah dengan penerapan pemerintahan transisi, hasil dari negosiasi saluran diplomatik Konferensi Jenewa.

Lesson learned (proses pembelajaran) dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi dalam proses penyelesaian konflik di Suriah

Memperhatikan permasalahan di Suriah merupakan sengketa internal, namun karena status dari *Free Syrian Army* selaku oposisi Suriah menjadi belligerent maka tidak dapat dikatakan sengketa internal lagi. Oleh karena itu, upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah bila ditinjau dari **perspektif strategi** menunjukkan berbagai langkah telah dilakukan dalam upaya meredam ketegangan di Suriah yaitu melalui organisasi internasional yaitu PBB, yang telah mengeluarkan resolusi untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah namun pada faktanya belum berhasil. Selain itu strategi lain pun diterapkan yaitu dengan melibatkan organisasi internasional regional yaitu Liga Arab, yang mengirimkan misi pengamat Liga Arab yang membawa proposal perdamaian dan Uni Eropa, yang melakukan embargo senjata dan penerbangan bagi seluruh maskapai penerbangan Suriah.

7. Security Council, "Resolution 2042 (2012)", http://www.un.org/en/ga/search/vie_w_doc.asp?symbol=S/RES/2042%282012%29, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Dalam hal ini, PBB mendominasi upaya penyelesaian sengketa Suriah, ini disebabkan karena sengketa tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan PBB sebagai organisasi antar negara mempunyai tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Sementara ditinjau dari **perspetif komunikasi**, dengan melihat pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Suriah cukup banyak, maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya pelaksanaan komunikasi yang efektif sehingga proses penyelesaian konflik di Suriah dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut dikarenakan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik di Suriah memiliki kepentingan pada Suriah. Seperti halnya Rusia dan China yang tidak ingin kepentingan mereka di Suriah terganggu, karena Suriah merupakan negara yang berarti bagi Rusia dan China. Sementara bagi Iran keberadaan Bashar Al-Assad merupakan salah satu benteng penting Iran dalam menghadapi ancaman Israel. Mendasari hal tersebut, maka komunikasi yang efektif sangat diperlukan.

Penutup.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik **kesimpulan** bahwa sengketa di Suriah disebabkan karena kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Suriah yang tidak demokratis dan diktator, yang kemudian memunculkan perlawanan dari rakyat Suriah dan berujung kekerasan terhadap rakyat Suriah. Hal tersebut membuat terbentuknya kelompok oposisi *Free Syrian Army* (FSA). Selain faktor di atas, keberhasilan negara Tunisia, Mesir, dan Libya dalam melakukan perlawanan menimbulkan kepercayaan diri bahwa rakyat Suriah mampu melawan pemerintah. PBB dalam penyelesaian sengketa Suriah telah mengeluarkan resolusi-resolusi, namun gagal diterapkan. Langkah yang tepat diambil untuk penyelesaian sengketa Suriah adalah dengan melaksanakan hasil negosiasi Konferensi Jenewa I dan II yaitu pembentukan pemerintahan transisi.

Mendasari hal tersebut, dengan memperhatikan hasil yang dicapai dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Suriah dihadapkan pada alternatif dari hasil negosiasi diperoleh dihasilkan **Menang-Kalah**. Hal ini dapat terlihat dari upaya PBB yang telah melakukan langkah negosiasi melalui Konferensi Jenewa namun belum ditemukan jalan keluar. Disamping itu hasil Konferensi Jenewa berupa pemerintahan transisi masih terus diusahakan oleh negara gabungan Arab-Barat. Langkah mediasi dan jasa-jasa baik yang telah diterapkan oleh PBB menemui kegagalan, berdasarkan Pasal 33 Piagam masih ada langkah konsiliasi, arbitrase, serta melalui Mahkamah Internasional. Namun ketiga langkah tersebut tidak dapat diterapkan pada sengketa Suriah, karena konsiliasi sifat putusannya tidak mengikat, jadi tidak akan efektif apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketaan

Referensi :

1. M. Agastya ABM, Arab Spring Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah, (Jogjakarta : IRCISoD, 2013), hlm. 10
2. Politik Arab Spring di Timur Tengah (2011), dikutip dari : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>.
3. Tentara Pembebasan Suriah, dikutip dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Pembebasan_Suriah
4. Prancis Minta PBB Berikan Dukungan untuk Rakyat Suriah, dikutip dari : <https://news.detik.com/internasional/d-2038004/prancis-minta-pbb-berikan-dukungan-untuk-rakyat-suriah>
5. Politik Arab Spring di Timur Tengah (2011), dikutip dari : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>.
6. Suriah Izinkan Pengamat Liga Arab Masuk, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/12/20/suriah.izinkan.pengamat.liga.arab.mas.uk>
7. Security Council, "Resolution 2042 (2012)", http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2042%282012%29 diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Letkol Inf Nanang Tri Martono, SPd. Abituren Sepa PK Tahun 1995. Jabatan Kabagoramil Subdisbinor Disjasad. Saat ini sdg mengikuti Dikreg LX Seskoad



KOLONEL ARM ROBBY MT. S.PD. MP.D.

KONSEPSI MEMBENTUK SDM YANG BERKUALITAS MELALUI PENDIDIKAN KHUSUS DOSEN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SESKOAD

Latar Belakang.

Dalam era globalisasi seperti sekarang perkembangan kehidupan dunia semakin maju dan semakin kompleks, perkembangan perubahan kehidupan pun begitu cepat, dunia pendidikan harus cepat dalam mengambil sikap dan inovasi agar pendidikan tetap dijadikan jalan utama untuk mendapat tempat dalam menata kehidupan yang lebih berkualitas sehingga tugas institusi pendidikan kedepan semakin kompleks dan semakin banyak tantangan semakin kedepan semakin berat bila kita tidak bisa mengikuti perkembangannya, sehingga dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yang dapat diterima dan berintegrasikan pada semua kalangan, bila kita merujuk pada UUD 1945. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 31 menjelaskan tentang pendidikan yang berhak untuk diambil oleh setiap warga negara, tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar, kewajiban negara dalam membiayai pendidikan serta mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Bila kita menelaah dari pasal tersebut begitu hebat negara Indonesia karena warganya berpendidikan, secara otomatis masyarakat akan selalu mengikuti perkembangan era globalisasi seperti sekarang ini, disinilah perlu pendidikan di lingkungan pendidikan Seskoad salah pendidikan yang tertinggi di lingkungan Angkatan Darat untuk menempatkan posisi dengan berinovasi sesuai mengikuti perkembangan yang ada, dengan membuat inovasi yang lebih baik dan berkualitas yang dapat diterima oleh semua kalangan agar semboyan “ **TERBAIK TERHORMAT, DAN DISEGANI** ” dapat diwujudkan

dari semua aspek baik lulusannya, dosen, kurikulum dan lembaganya.

Bila kita merujuk kembali kepada kurikulum di lingkungan pendidikan Seskoad yang ada sekarang ini, kurikulum sudah cukup memadai serta dapat dijadikan sebagai kurikulum pendidikan yang terbaik di lingkungan Angkatan Darat, serta dapat dikatakan penuh inovasi dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada. Agar pendidikan di lingkungan pendidikan Seskoad ke depan selalu up to date dengan perkembangan zaman, maka perlu adanya suatu sentuhan inovasi secara mendasar dan utuh yang dipandang dari hasil didik, tenaga pendidik, serta kurikulumnya, sehingga perlu adanya konsep penataan kembali kepada para tenaga pendidik atau dosen di lingkungan pendidikan Seskoad untuk diberikan pendidikan khusus sebagai dosen Di lingkungan pendidikan Seskoad sebelum melakukan proses belajar-mengajar, yang sesuai dengan tujuan pendidikan di lingkungan Seskoad itu sendiri, untuk membentuk para calon pimpinan Angkatan Darat di masa yang akan datang perlu memperhitungkan dari beberapa aspek diantaranya saat rekrutmen calon untuk menjadi salah satu dosen di lingkungan pendidikan Seskoad harus mempunyai kualitas dan pengalaman yang cukup di bidang akademik dan penugasan strategis lainnya, di lingkungan Angkatan Darat, yang juga harus diimbangi dengan konsekuensi pembinaan kariernya, sesuai yang ditetapkan dengan aturan Kepala Staf Angkatan Darat dengan menitikberatkan pada kesempatan pertama kepada dosen di lingkungan pendidikan Seskoad yang telah mengabdikan selama 6 bulan

hingga 1 tahun atau lebih, untuk diprioritaskan menempati jabatan strategis di lingkungan Angkatan Darat. Hal ini wajar karena membentuk calon pimpinan tidak mudah memberi perintah kepada bawahan yang ada di lapangan, sehingga nantinya semua pejabat strategis Angkatan Darat selain pernah merasakan pendidikan di lingkungan pendidikan Seskoad juga pernah menjadi dosen di lembaga lingkungan pendidikan Seskoad.

2. Pembahasan.

Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas maka perlu dilakukan suatu langkah yang strategis dengan memberikan pengetahuan melalui pendidikan khusus bagi dosen di lingkungan pendidikan Seskoad, dalam rangka untuk mendukung proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan Seskoad dengan menentukan kurikulum pendidikan khusus, yang diberikan bagi para dosen di lingkungan pendidikan Seskoad, melalui strategi pendidikan yang intensif secara terencana terarah dan terkoordinasi dengan lingkungan akademisi di luar lingkungan pendidikan Seskoad. Diharapkan bila nantinya para dosen ini menempati jabatan baru diluar lingkungan pendidikan Seskoad selalu menjadi andalan karena kemampuan sumber daya manusianya, sehingga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan, **Pertama** strategi meningkatkan sumberdaya manusia dosen di lingkungan pendidikan Seskoad dengan diadakan pendidikan khusus bagi dosen di lingkungan pendidikan Seskoad selama 6 bulan, dengan kurikulum yang diatur dan di konsep sesuai dengan tujuan pendidikan, di lingkungan pendidikan Seskoad , sehingga nantinya para dosen ini dalam mencetak para calon pimpinan Angkatan Darat di masa yang akan datang, diharapkan para dosen di lingkungan pendidikan Seskoad ini semakin terarah, terencana, dan terukur dengan baik serta berkualitas, dalam melakukan proses belajar-mengajarnya, untuk tercapainya strategi pertama ini maka pimpinan Angkatan Darat diharapkan dapat membuat suatu

kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan/ST Kasad tentang prioritas bagi dosen di lingkungan pendidikan Seskoad yang telah menduduki dan yang telah mengikuti pendidikan dosen di lingkungan pendidikan Seskoad dan mengajar selama sedikitnya 6 bulan diprioritaskan untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Angkatan Darat, **kedua** strategi diharapkan Kepala Staf Angkatan Darat dapat melakukan kerja sama dengan universitas pendidikan Indonesia serta memberikan kemudahan karier bagi seluruh dosen di lingkungan pendidikan Seskoad yang telah mengikuti pendidikan khusus dosen di lingkungan pendidikan Seskoad selama 6 bulan dan menjadi dosen di lingkungan pendidikan Seskoad sedikitnya 1 tahun, akan diberikan gelar sebagai sarjana S2 pendidikan, dari universitas pendidikan yang berada di Bandung (dengan menempuh pendidikan S2), **ketiga** strategi untuk memberikan gelar akademik kepada para lulusan di lingkungan pendidikan Seskoad yang bekerja sama dengan universitas pertahanan dengan kemampuan sebagai perwira menengah Angkatan Darat yang mempunyai kualifikasi khusus ahli strategi perang darat, dasar pemberian ini adalah dilandasi dengan kemampuan perwira Angkatan Darat dalam bidang pertahanan wilayah di darat, serta ilmu teritorial dan strategi pertempuran darat, dimana kemampuan ini tidak dapat dimiliki oleh institusi lainnya.

Adapun beberapa kendala dan hambatan yang didapat dalam mengaplikasikan konsep ini adalah konsekuensi dari pimpinan tertinggi TNI-AD yang sering berubah untuk memprioritaskan jabatan strategis di lingkungan TNI-AD diberikan kepada dosen Seskoad yang telah mengikuti pendidikan khusus dosen Seskoad dan telah mengajar secepatnya 6 bulan atau 1 tahun atau lebih. Pemikiran yang tidak selaras serta cara memandang dalam meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pendidik dan lulusannya dalam suatu lembaga yang sangat disegani di lingkungan Angkatan Darat ini, ditataran pengambil kebijakan menengah biasanya para pengambil kebijakan ini hanya melihat dari sisi

perubahannya saja tidak mengetahui yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini, tidak melihat dari sisi perkembangan zaman dan dampak yang terjadi nantinya, sehingga bila kita tidak dengan cepat melakukan perubahan pada perkembangan sekarang ini, maka semboyan “ **TERBAIK TERHORMAT DAN DISEGANI** “ akan luntur dimakan zaman. Untuk menentukan menentukan maju tidaknya pendidikan di lingkungan pendidikan Seskoad ini, maka sangat dibutuhkan sekali kualitas sumber daya manusia pimpinan yang tertinggi di lingkungan Angkatan Darat seperti sekarang ini, banyak menemukan perubahan berani mendobrak semua kebijakan yang dianggap tidak membawa kemajuan di institusi Angkatan Darat.

Upaya yang telah dilakukan Danseskoad di lingkungan pendidikan Seskoad selama ini telah banyak memberikan wawasan bagi para perwira siswanya untuk melakukan riset belajar mandiri di masa pandemi covid 19 saat ini, dengan mencari sumber dari beberapa negara, hal ini dapat menjadi ilmu baru bagi para perwira siswanya, secara tidak langsung para perwira siswanya untuk dipaksa melihat kepemimpinan para pemimpin dunia, dan nantinya dapat dibandingkan dengan kepemimpinannya, disisi lain lembaga memberikan konsep belajar mandiri dan memaksa perwira siswanya harus bisa melakukan belajar mandiri melalui TOR yang telah dituangkan dalam silabus, pembelajaran seperti ini sangat cocok diberikan kepada calon para pemimpin Angkatan Darat, agar para perwira menengah Angkatan Darat ini mau dan dipaksa untuk belajar dan membiasakan untuk budaya membaca dan menulis, ini suatu pembelajaran yang bagus yang perlu mendapatkan dukungan dari para dosen dan pengambil kebijakan tertinggi Angkatan Darat, dalam menyikapi pembelajaran di lingkungan pendidikan Seskoad ini hanya perlu suatu inovasi dari konsep yang telah dilakukan di lembaga pendidikan di lingkungan Seskoad ini, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya dosen di lingkungan pendidikan Seskoad melalui pendidikan khusus dosen dan peningkatan kualitas dari lulusannya Seskoad.

3. Tugas Pokok Seskoad.

Tugas pokok Seskoad adalah menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AD serta menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan matra darat dan masalah-masalah strategis. Di lingkungan pendidikan Seskoad itu sendiri adalah lembaga pendidikan tertinggi di lingkungan TNI AD, yang bertugas mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya para Pamen TNI AD menjadi calon pimpinan yang **TERBAIK, TERHORMAT, DAN DISEGANI** pada tingkatan menengah ke atas di lingkungan TNI AD, sehingga dalam aktivitasnya dari mulai proses belajar-mengajar hingga lulusannya akan melahirkan para perwira menengah Angkatan darat yang berkualitas dan profesional yang siap melaksanakan tugas dalam segala situasi dan kondisi.

Dalam proses belajar-mengajar di lingkungan pendidikan Seskoad, kurikulum yang digunakan di lingkungan pendidikan Seskoad saat ini telah memenuhi standar. Dalam mencetak para calon pimpinan Angkatan Darat ke depan dan telah memenuhi standart kurikulum sesuai tujuan dari pada pendidikan Seskoad hanya perlu adanya sentuhan inovasi, sehingga perlunya suatu perubahan dari beberapa inovasi melalui konsep yang sangat mendasar dengan merujuk ke dalam, dengan memberikan perubahan dengan sentuhan konsep peningkatan kualitas sumber daya manusianya terutama kepada para dosen di lingkungan pendidikan Seskoad, dengan memberikan pendidikan khusus kepada dosen di lingkungan pendidikan Seskoad yang terintegrasikan dengan kariernya, yang bekerja sama dengan universitas pendidikan indonesia yang berada di bandung, Dalam kurun waktu yang ditentukan para dosen di lingkungan pendidikan Seskoad ini pantas mendapatkan gelar sebagai sarjana pendidikan setingkat S2 dari universitas pendidikan Indonesia, sedangkan untuk pembiayaannya ditanggung oleh negara melalui SUAD sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Angkatan Darat, dan untuk peserta didik adalah perwira siswa dengan diberikan inovasi konsep penambahan

kurikulum yang sangat mendasar selain kurikulum yang sekarang perlu diberikan tambahan wajib bagi perwira siswa untuk dapat memberikan tulisan essay berupa konsepsi yang berhubungan dengan kekurangan dan hambatan yang selama ini terjadi di Angkatan darat pada setiap minggunya, disini siswa dipaksa untuk dapat menuangkan ide gagasan konsep yang dihadapi Angkatan darat selama ini untuk dipecahkan, inilah konsekuensi bagi perwira siswa yang akan mengikuti pendidikan di lingkungan di lingkungan pendidikan Seskoad, dan untuk setiap bulan para siswa diwajibkan untuk membuat essay 2 biji dengan materi wajib tentang kepemimpinan negara lain dan pemecahan masalah situasi bangsa ini dan para siswa di paksakan untuk dapat menilai setiap kejadian dan situasi dengan melihat dari “ **dHambatan dan Kendala serta Masalah adalah Kunci Menggapai Prestasi dengan metode penulisan konsepsi atau strategi penanganan, mewujudkan, pembentukan** dimana metode ini akan dirasakan berat oleh para perwira siswa itu hanya awalnya saja, tetapi setelah para siswa ini telah menulis 3 kali essay, kesulitan dan hambatan itu tidak ada lagi, disini para siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah yang dilihatnya, baik dalam lingkungan Angkatan Darat atau situasi negara ini, yang perlu saran dan masukan dari semua elemen bangsa ini, diantaranya institusi Angkatan Darat, ke depan saran dan tanggapan dari institusi Angkatan Darat akan lebih diperhitungkan dalam tataran kebijakan negara ini, dan semboyan di lingkungan pendidikan Seskoad **TERBAIK, TERHORMAT DAN DISEGANI** adalah bukan slogan biasa tapi semboyan bagi lulusan yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang perlu diperhitungkan pemikirannya.

Dalam membuat konsep kurikulum yang diberikan untuk membentuk Pendidikan khusus bagi dosen di Seskoad, maka perlu dibentuk kurikulum khusus yang sesuai dengan tujuan pendidikan Seskoad, pembentukan kurikulum bagi dosen di lingkungan pendidikan Seskoad ini Pertama penguasaan materi taktik sesuai dengan

tujuan pembentukan pendidikan di lingkungan pendidikan Seskoad diantaranya lulusannya nantinya mampu menerapkan kepada para siswa yang dapat menjadi seorang komandan perang yang tangguh, yang diaplikasikan dengan taktik dan pertempuran yang terjadi di dunia saat ini, termasuk teknologinya diharapkan para dosen di lingkungan pendidikan Seskoad ini nantinya akan timbul wawasan perbandingan perang dan pertempuran yang perlu dijadikan acuan dan referensi dalam memimpin pertempuran dilapangan nantinya hal ini akan ditularkan dan ditransfer ke para perwira siswa nantinya, selain itu juga para dosen harus benar benar menguasai taktik dalam teori pertempuran, kedua para dosen diberikan pelajaran dalam mengasah kemampuannya dalam menulis dan mengembangkan suatu masalah yang dapat dijadikan suatu tulisan untuk menemukan suatu pemecahan yang tepat, di sini diharapkan dengan pelajaran menulis dan memecahkan masalah para dosen mempunyai level menguasai, sehingga nantinya para dosen dalam memberikan proses belajar-mengajar pada para perwira siswanya dapat terencana, terarah dan terukur dengan baik, dan para siswa dapat menerima dengan utuh pelajaran yang diberikan oleh para dosen yang profesional dan berkualitas, ketiga para dosen di lingkungan pendidikan Seskoad diberikan pelajaran tentang IT terbaru (*cyber*) dan teknologi masa kini dengan dihadapkan pada sudut ekonomi, politik, pertempuran, konflik, dan kepemimpinan negara lain yang sedang berkembang, sehingga diharapkan para dosen nantinya dapat memberikan transfer pengetahuan dengan utuh dan lengkap kepada para perwira siswa tentang IT untuk itu perlunya danseskoad untuk menggandeng para perusahaan IT yang ada saat ini untuk membantu dalam mengembangkan ilmunya ke lingkungan pendidikan seskoad.

Untuk mewujudkan lulusan perwira menengah Angkatan Darat yang profesional dan berkarakter serta mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka setelah lulus dari pendidikan di lingkungan pendidikan Seskoad diharapkan para perwira ini siap

bertugas dalam segala medan dan situasi, serta dapat diterima dan disegani di semua kalangan institusi pemerintah, dan elemen masyarakat yang ada dinegara kesatuan republik ini, sehingga diperlukan konsep hasil didik lulusan di lingkungan pendidikan Seskoad yang berkarakter, berkualitas serta profesional, selain merujuk pada ilmu taktik dan ilmu pengetahuan yang ditetapkan oleh di lingkungan pendidikan Seskoad , diharapkan semua lulusan di lingkungan pendidikan Seskoad nantinya mempunyai kemampuan ahli dalam mengelolah pertempuran wilayah pertahanan darat diseluruh wilayah kesatuan republik indonesia, untuk mendapatkan kualitas yang diharapkan di lingkungan pendidikan Seskoad tersebut maka perlu adanya strategi penyatuan program di lingkungan pendidikan Seskoad dengan kurikulum universitas pertahanan, sehingga diharapkan semua perwira siswa setelah lulus dari pendidikan di lingkungan pendidikan Seskoad ini pantas mendapat gelar S2 pertahanan yang siap dalam melaksanakan tugas di lapangan, serta siap bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya, dalam membangun dan mendukung program pemerintah.

4. Penutup.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis dapat mengajukan beberapa kesimpulan antara lain, pertama untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia dosen di lingkungan pendidikan Seskoad perlunya konsep untuk membuat kurikulum tentang pendidikan khusus dosen di lingkungan pendidikan Seskoad selama 6 bulan, yang diintegrasikan dengan universitas pendidikan Indonesia dalam kurun waktu tertentu para dosen di lingkungan pendidikan Seskoad mendapatkan gelar S2 pendidikan; kedua prioritas pengisian jabatan strategis di lingkungan Angkatan Darat diutamakan para dosen di lingkungan pendidikan Seskoad yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan; dan ketiga lulusan perwira menengah TNI-AD yang dilahirkan di lingkungan pendidikan Seskoad, diharapkan

menjadi lulusan yang berkualitas dan berkarakter dan diberikan gelar (S2) dari universitas pertahanan yang siap ditempatkan di segala penugasan dalam situasi dan kondisi yang dapat berintegrasikan dengan instansi pemerintah lainnya.

Untuk dapat merealisasikan gagasan di atas dapat disampaikan saran sebagai berikut: pertama diharapkan Pimpinan yang tertinggi TNI-AD dapat melakukan kerja sama dengan universitas pertahanan dan universitas pendidikan indonesia guna untuk membantu dalam mengembangkan kurikulum pendidikan khusus dosen seskoad dan lulusannya; kedua .konsekuensi dari pimpinan tertinggi TNI-AD yang tidak berubah untuk memprioritas jabatan strategis di lingkungan TNI-AD diberikan kepada dosen Seskoad yang telah mengikuti pendidikan khusus dosen Seskoad dan telah mengajar secepatnya 6 bulan atau 1 tahun atau lebih.



Kolonel Arm Robby MT. S.Pd. MP.d. adalah abituren Akmil 1992 sedang menyelesaikan ujian tahap akhir. S.3 prodi penerangan masyarakat di universitas Pendidikan Indonesia. (Pasis seskoad 2021) sekarang menjabat sebagai Widyaiswara Di kementerian pertahanan RI.



SESKOAD
Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISSN 2086-9312



9772086931295